

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**FIONA PUSPITA DEVI PURWANTO  
09412144020**

**PRODI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2013**

**PERSETUJUAN**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**FIONA PUSPITA DEVI PURWANTO**

**09412144020**



Dosen Pembimbing,

**Abdullah Taman, S.E. Akt., M.Si**

**NIP. 19630624 199001 1 001**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul :

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)**

yang disusun oleh :

**FIONA PUSPITA DEVI PURWANTO**

**NIM 09412144020**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Mei 2013

dan dinyatakan lulus.

**DEWAN PENGUJI**

| Nama                           | Kedudukan          | Tanda Tangan  | Tanggal         |
|--------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Ngadirin Setiawan, M.S         | Ketua Penguji      |  | 6/6-13<br>..... |
| Abdullah Taman, S.E.Akt., M.Si | Sekretaris Penguji |  | 5/6-13<br>..... |
| M. Djazari, M.Pd               | Penguji Utama      |  | 4/6-13<br>..... |

Yogyakarta, 14 Juni 2013

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



  
Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fiona Puspita Devi Purwanto

NIM : 09412144020

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau di terbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 10 Mei 2013  
Penulis ,

Fiona Puspita Devi Purwanto  
NIM. 09412144020

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Life is all about taking a risk, if you never take a risk, you will never achieve your dreams.”*

(Disney Word)

“Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.”

(Umar Bin Khattab)

“Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yang telah dicari”

( Sayidina Ali)

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

- Siti Tota Ugijani dan Sugeng Purwanto, S.E., M.Si. Ibu dan bapak terhebat yang selalu memberikan semangat, limpahan kasih sayang, dukungan dan motivasi tanpa henti.

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)

Oleh :

FIONA PUSPITA DEVI PURWANTO  
09412144020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. 2) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. 3) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. 4) Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 yang berjumlah 33 kabupaten dan kota. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x1y}$ ) sebesar 0,071; koefisien determinasi ( $r^2_{x1y}$ ) 0,005;  $t_{hitung}$  0,809 <  $t_{tabel}$  1,65685. 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x2y}$ ) sebesar 0,375; koefisien determinasi ( $r^2_{x2y}$ ) 0,141;  $t_{hitung}$  4,612 >  $t_{tabel}$  1,65685. 3) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x3y}$ ) sebesar 0,112; koefisien determinasi ( $r^2_{x3y}$ ) 0,013;  $t_{hitung}$  1,288 <  $t_{tabel}$  1,65685. 4) Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,383; koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) 0,147;  $F_{hitung}$  7,344 >  $F_{tabel}$  2,67.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SwT., atas segala limpah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si. Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Abdullah Taman M.Si., Ak. Dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Moh. Djazari, M.Pd. Narasumber yang selalu bersedia memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang telah membantu dalam kepentingan menyusun skripsi.
6. Seluruh jajaran dosen jurusan Pendidikan Akuntansi.
7. Pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungannya kepada penulis baik secara material maupun spiritual, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 10 Mei 2013

Penulis

Fiona Puspita Devi Purwanto

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| LEMBAR JUDUL  | i       |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                               | ii      |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                | iii     |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                      | iv      |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                            | v       |
| ABSTRAK.....  | vi      |
| KATA PENGANTAR.....                                   | vii     |
| DAFTAR ISI.....                                       | ix      |
| DAFTAR TABEL.....                                     | xi      |
| DAFTAR GAMBAR.....                                    | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                  | xii     |
| BAB I. PENDAHULUAN.....                               | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1       |
| B. Identifikasi Masalah.....                          | 5       |
| C. Pembatasan Masalah.....                            | 5       |
| D. Rumusan Masalah.....                               | 6       |
| E. Tujuan Penelitian.....                             | 6       |
| F. Manfaat Penelitian.....                            | 7       |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....      | 8       |
| A. Deskripsi Teori.....                               | 8       |
| 1. Belanja Modal.....                                 | 8       |
| a. Pengertian Belanja Modal.....                      | 8       |
| b. Peran Belanja Modal.....                           | 9       |
| c. Jenis-jenis Belanja Modal.....                     | 10      |
| d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal..... | 11      |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi.....                           | 13      |
| 3. Pendapatan Asli Daerah.....                        | 14      |
| a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....             | 14      |
| b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....          | 15      |
| 4. Dana Alokasi Umum (DAU).....                       | 23      |
| a. Pengertian Dana Alokasi Umum.....                  | 23      |
| b. Tahapan-tahapan Penghitungan DAU.....              | 25      |
| c. Ketentuan Perhitungan DAU.....                     | 26      |
| B. Penelitian yang Relevan.....                       | 28      |
| C. Kerangka Berpikir.....                             | 29      |
| D. Paradigma Penelitian.....                          | 35      |
| E. Hipotesis.....                                     | 36      |

|   | Halaman |
|---|---------|
| BAB III METODE PENELITIAN.....  | 37      |
| A. Desain Penelitian .....  | 37      |
| B. Definisi Operasional Variabel.....   | 37      |
| C. Populasi.....  | 39      |
| D. Metode Pengumpulan Data.....   | 39      |
| E. Teknik Analisis Data.....  | 40      |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....   | 46      |
| A. Hasil Penelitian.....  | 46      |
| 1. Data Umum.....   | 46      |
| 2. Data Khusus.....   | 47      |
| 3. Analisis Data.....   | 50      |
| a. Uji Asumsi Klasik.....   | 50      |
| b. Uji Hipotesis.....   | 57      |
| 1) Uji Regresi Linier Sederhana.....  | 57      |
| 2) Uji Regresi Linier Berganda.....   | 62      |
| B. Pembahasan.....  | 65      |
| 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.   | 65      |
| 2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.....  | 66      |
| 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal...   | 68      |
| 4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Simultan terhadap Belanja Modal..... | 69      |
| C. Keterbatasan Penelitian.....   | 71      |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....   | 72      |
| A. Kesimpulan .....   | 72      |
| B. Saran .....  | 73      |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 75      |
| LAMPIRAN.....   | 77      |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel  |         |
| 1. Tarif Pajak Kabupaten dan Kota.....   | 17      |
| 2. Prinsip Penentuan Tarif Retribusi.....                                      | 21      |
| 3. Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU.....                                | 27      |
| 4. Panduan Pengambilan Keputusan <i>DW test</i> .....                          | 42      |
| 5. Prosedur Penentuan Data.....  | 47      |
| 6. Rangkuman Data Khusus.....  | 48      |
| 7. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....   | 52      |
| 8. Uji Multikolonieritas Dengan Matriks Korelasi.....                          | 53      |
| 9. Uji Multikolonieritas Dengan Nilai <i>Tolerance</i> dan <i>VIF</i> ..       | 54      |
| 10. Hasil Uji Autokorelasi.....  | 56      |
| 11. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel<br>Pertumbuhan Ekonomi.....    | 57      |
| 12. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel<br>Pendapatan Asli Daerah..... | 59      |
| 13. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana<br>Alokasi Umum.....      | 61      |
| 14. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....                           | 63      |

## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1. Paradigma Penelitian.....                 | 35      |
| 2. Grafik Histogram Normalitas.....                 | 50      |
| 3. Uji Normalitas Dengan Normal <i>P-Plot</i> ..... | 51      |
| 4. Diagram Heteroskedastisitas.....                 | 55      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1. Tabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal ... | 77      |
| 2. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....   | 83      |
| 3. Tabel PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2008-2011.....   | 93      |
| 4. Data Belanja Daerah.....  | 98      |
| 5. Tabel Perhitungan Natural Logaritma PAD, DAU, dan Belanja Modal.....                                | 108     |
| 6. Hasil Analisis Regresi.....   | 117     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini

belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Saranggih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Mudrajat Kuncoro, 2004). Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan jumlah Belanja Pegawai.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada Pertumbuhan Ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah maka akan berdampak pada periode

yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Belanja Modal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk

membayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah DAK yaitu Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Modal.

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi dari penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dengan waktu, obyek yang berbeda namun variabel dan alat analisis yang digunakan adalah sama. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2011. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal” (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Pemanfaatan belanja daerah yang kurang tepat oleh pemerintah daerah, yaitu digunakan untuk membiayai belanja yang relatif kurang produktif dibanding untuk Belanja Modal.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tidak diikuti dengan naiknya Belanja Modal.
3. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal.
4. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang tidak sesuai dengan tujuannya.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, peneliti membatasi masalah pada :

1. Periode penelitian ini adalah tahun 2008-2011.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

3. Variabel bebasnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Variabel terikatnya adalah Belanja Modal.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah .
2. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama- sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuandaerah.
2. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Belanja Modal**

###### **a. Pengertian Belanja Modal**

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut Syukriy Abdullah & Abdul

Halim (2004), Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan mafaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

#### **b. Peran Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi . Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (PP No. 24 Tahun 2005).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Secara teoritis ada 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya

dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

### **c. Jenis-jenis Belanja Modal**

Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (PP No. 24 Tahun 2005) :

#### **a. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### **b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan /penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### **c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

**d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan angka yang menunjukan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal

pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah lainnya dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Salah satu dana transfer yang berasal dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi. Sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU yang bersangkutan.

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan daerah.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumberdaya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Boediono (1985) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Sejalan dengan Boediono (1985) Sadono Sukirno (1991) menyebutkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang.

Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. “Secara tradisional, Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB” (Juli Panglima Saranggih, 2003). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDRB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur keseluruhan performa dari suatu perekonomian.

Namun dengan demikian Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini

kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdul Halim (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sholikin Bratakusuma (2003) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

#### **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasar UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

##### 1) Pajak Daerah

Berdasar Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah , pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b) Sebagai alat pengukur (*regulatory*)

Jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah:

a) Pajak Provinsi :

- (1) Pajak kendaraan bermotor:
- (2) Kendaraan bermotor bukan umum.
- (3) Kendaraan bermotor umum
- (4) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b) Pajak kendaraan diatas air

c) Bea balik nama kendaraan bermotor :

Penyerahan pertama :

- (1) Kendaraan bermotor bukan umum.
- (2) Kendaraan bermotor umum
- (3) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan kedua :

- (1) Kendaraan bermotor bukan umum.
- (2) Kendaraan bermotor umum
- (3) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan kerena wasiat :

- (1) Kendaraan bermotor bukan umum.
- (2) Kendaraan bermotor umum
- (3) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- d) Bea balik nama kendaraan di atas air :
  - (1) Penyerahan pertama
  - (2) Penyerahan kedua
  - (3) Penyerahan karena wasiat
- e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- f) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah dan air permukaan
- g) Pajak Kabupaten dan Kota
  - (1)Pajak Hotel
  - (2)Pajak Restoran
  - (3)Pajak Hiburan
  - (4)Pajak Reklame.
  - (5)Pajak Penerangan Jalan
  - (6)Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - (7)Pajak Parkir

**Tabel 1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota**

| <b>NO</b> | <b>Pajak Kabupaten dan Kota</b> | <b>Tarif Maksimum (%)</b> |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| 1         | Pajak hotel                     | 10                        |
| 2         | Pajak restoran                  | 10                        |

| <b>NO</b> | <b>Pajak Kabupaten dan Kota</b>           | <b>Tarif Maksimum (%)</b> |
|-----------|---|---------------------------|
| 3         | Pajak hiburan                             | 35                        |
| 4         | Pajak reklame                             | 25                        |
| 5         | Pajak penerangan jalan                    | 10                        |
| 6         | Pajak pengambilan bahan galian golongan C | 20                        |
| 7         | Pajak parkir                              | 20                        |

Sumber UU No. 18 Tahun 1997

Sistem pengenaan pajak :

- a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginya dasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
- b) Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
- c) Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

## 2) Retribusi Daerah.

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang Pendapatan Asli

Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA untuk kepentingan pribadi maupun badan.

Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena adanya pemakaian ruangan pasar oleh si pembayar retribusi. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik . Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasar manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang

yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang selama ini berlaku telah menyebabkan daerah berpeluang untuk memungut pajak yang diataranya memiliki biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya tidak memadai. Beberapa kelemahan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah antara lain sebagai berikut :

- a) Hasilnya kurang memadai dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.
- b) Biaya pungutnya relatif tinggi
- c) Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi, terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif.
- d) Beberapa retribusi pada hakekatnya bersifat pajak, karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayaran retribusi.
- e) Adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- f) Adanya retribusi yang mempunyai dasar pengenaan dan objek sama.

Oleh karena itu pada tahun 1997, pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan tersebut sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 2 Prinsip Penentuan Tarif Retribusi**

| No | Objek atau Jenis Retribusi Daerah | Prinsip atau Kriteria Penentuan Tarif  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1  | Retribusi Jasa Umum               | 1. Besarnya biaya atau penyediaan jasa yang bersangkutan<br>2. Kemampuan masyarakat<br>3. Aspek keadilan |
| 2  | Retribusi Jasa Usaha              | Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak  |
| 3  | Retribusi Perizinan tertentu      | Tujuan untuk menutup semua/seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.               |

Sumber UU No.34 Tahun 2000

Jenis-jenis retribusi yang ada didaerah adalah :

a) Retribusi Umum

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain :

- (1)Pelayanan kesehatan
- (2)Pelayanan kebersihan dan persampahan
- (3)Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.
- (4)Pengujian kapal perikanan

b) Retribusi Jasa Usaha

- (1)Pemakaian kekayaan daerah.

- (2) Pelayanan terminal
  - (3) Pelayanan tempat khusus parkir
  - (4) Tempat rekreasi dan olahraga
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain :

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah
- (2) Izin mendirikan bangunan
- (3) Izin trayek
- (4) Izin pengambilan hasil hutan

### 3) Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan ( bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan dibidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah

lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

#### 4) Penerimaan lain-lain

Pengertian penerimaan lain-lain Daerah kabupaten dan kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten dan kota diluar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

### **4. Dana Alokasi Umum (DAU)**

#### **a. Pengertian Dana Alokasi Umum**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimalnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak juga menyebabkan

pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah, sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005).

Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten dan kota.

DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup

bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*).

## **b. Tahapan-tahapan Penghitungan DAU**

### 1) Tahapan akademis

konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2) Tahapan administratif

Dalam tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran data yang akan di gunakan.

3) Tahapan teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4) Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

**c. Ketentuan Perhitungan DAU**

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum suatu daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten dan Kota yang bersangkutan.

- d. Porsi daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. ( Bambang Kesit Prakosa, 2004)

**Tabel 3 Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU :**

| Besarnya DAU  | DAU untuk Provinsi | DAU untuk Kabupaten dan Kota |
|---|--------------------|------------------------------|
| 25% x APBN  | 10% x 25% x APBN   | 90% x 25% x APBN             |
| DAU Suatu Provinsi=<br>$\frac{\text{bobot seluruh provinsi yang bersangkutan}}{\text{bobot seluruh provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Provinsi}$                                |                    |                              |
| DAU Suatu Kabupaten dan Kota<br>$\frac{\text{bobot kabupaten dan kota yang bersangkutan}}{\text{bobot seluruh kabupaten dan kota di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Kabupaten dan Kota}$ |                    |                              |

Sumber: UU NO. 25 Tahun 1999

Menurut UU No. 25 Tahun 1999 Bobot Daerah ditentukan berdasarkan hasil kajian empiris dengan memperhitungkan variabel-variabel yang relevan. Pertama, kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Kedua, potensi ekonomi daerah antara lain dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima Daerah seperti potensi industri, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto.

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2004) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini Syukriy Abdullah dan Abdul Halim menggunakan 2 variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah.
2. David Harianto dan Priyo Hari Adi (2006) dengan judul Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Hasila yang dapat di tarik dari penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Perkapita .
3. Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian ini Darwanto dan Yustikasari menggunakan 3 variabel bebas dan 1 satu variabel terikat, variabel bebasnya adalah Pertumbuhan

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Nugroho Suratno Putro (2009) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian ini Nugroho menggunakan 3 variabel bebas dan 1 satu variabel terikat, variabel bebasnya adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Hasil dari penelitian Nugroho adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh secara terhadap anggaran Belanja Modal, peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Modal.

### **C. Kerangka Berpikir**

#### **1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.**

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan

penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita . Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah. Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi Pertumbuhan Ekonomi.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan yang lain dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda.

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No.32/24). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal oleh pemerintah.

Sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar terutama bila dikaitkan dengan politis.

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.**

Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004)

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber

pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari APBN yang mempunyai tujuan khusus.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

#### **4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Pertumbuhan Ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran.

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan

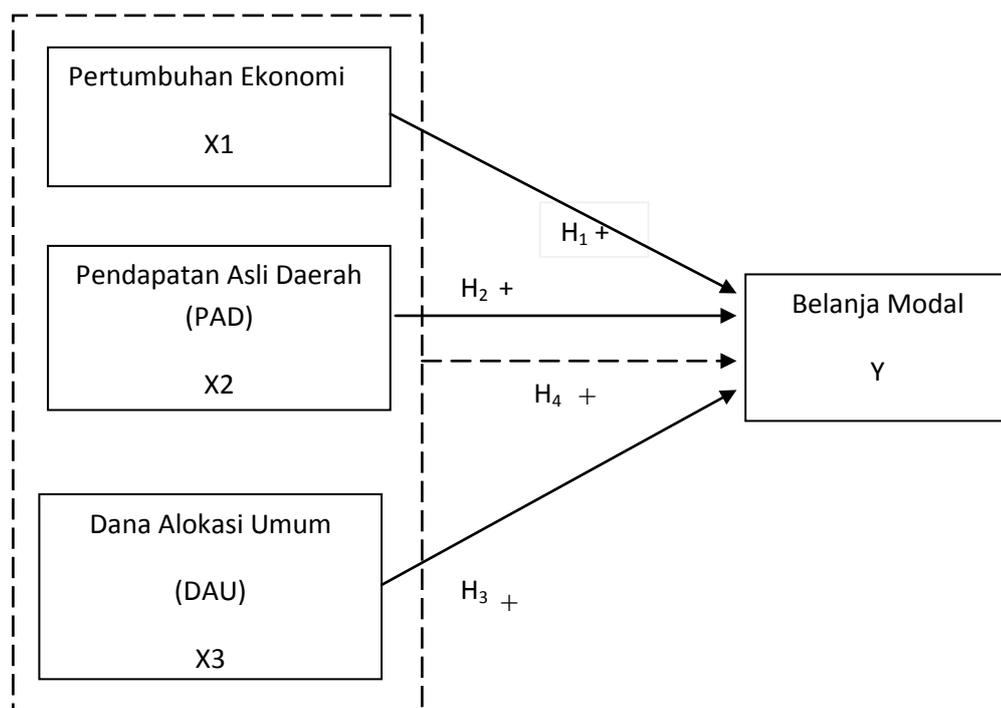
merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal. PAD di dapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan layanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui Belanja Modal.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU merupakan dana dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya dengan PAD, DAU adalah salah satu sumber untuk menambah investasi modal (Belanja Modal) yang membedakannya, PAD berasal dari dana masyarakat yang dikumpulkan sedangkan DAU berasal dari dana APBN.

Berdasar pendapat-pendapat dan pengertian dari masing masing variabel bebas yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal.

#### D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :



Gambar 1. Paradigma Penelitian

#### Keterangan:

- X<sub>1</sub> = Variabel Independen 1, Pertumbuhan Ekonomi
- X<sub>2</sub> = Variabel Independen 2, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X<sub>3</sub> = Variabel Independen 3, Dana Alokasi Umum (DAU)
- Y = Variabel Dependen, Belanja Modal
- > = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- - - - -> = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

**E. Hipotesis**

$H_1$  = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

$H_2$  = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

$H_3$  = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

$H_4$  = Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif karena bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Penelitian ini juga termasuk penelitian populasi, karena obyeknya adalah semua yang terdapat di dalam populasi.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

##### **1. Belanja Modal**

Adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator variabel ini diukur dengan :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,} \\ & \text{Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan input perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, yang dihitung dengan rumus.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1})}{(\text{PDRBt-1})} \times 100\%$$

Keterangan :

PDRBt = Produk Domestik Bruto Tahun Sekarang

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sebelumnya

## 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

#### 4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal

#### C. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:61). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2011 yang berjumlah 33 kabupaten dan kota.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal

yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dan dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) untuk data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008-2011.

## **E. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik, yaitu dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Data akan normal jika signifikansinya  $< \alpha = 0,05$ . Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model distribusi normal tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan nol. Untuk mendeteksi multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a) Koefisien korelasi antar variabel bebas  $\leq 0,60$ .
- b) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

### **c. Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut Homokedastisitas dan jika beda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antar nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin Watson* (*DW test*). *DW test* digunakan untuk korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen.

**Tabel 4. Panduan Pengambilan Keputusan *DW test***

| Hipotesis Nol                               | Keputusan           | Jika                          |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Tidak ada autokorelasi positif              | Tolak               | $0 < d < d_l$                 |
| Tidak ada autokorelasi positif              | <i>No Desicison</i> | $d_l \leq d \leq d_u$         |
| Tidak ada autokorelasi negatif              | Tolak               | $4 - d_l < d < 4$             |
| Tidak ada autokorelasi negatif              | <i>No Desicison</i> | $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi positif atau negatif | Tidak Ditolak       | $d_u < d < 4 - d_u$           |

## 2. Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2009:261). Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X = Variabel Bebas

a = konstanta

b = koefisien regresi

Uji regresi linier sederhana menggunakan koefisien determinasi ( $r^2$ ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara individual terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Modal digunakan Uji t (*t-test*), hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant* 5%.

## b. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji mult kolonieritas,, uji auto korelasi, serta data telah terdistribusi normal, maka data yang dikumpulkan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1PE + \beta_2PAD + \beta_3DAU + e$$

Keterangan :

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Y        | = Belanja Modal ( BM )                |
| $\alpha$ | = Konstanta                           |
| $\beta$  | = <i>Slope</i> atau koefisien regresi |
| PE       | = Pertumbuhan Ekonomi                 |
| PAD      | = Pendapatan Asli Daerah (PAD)        |
| DAU      | = Dana Alokasi Umum (DAU)             |
| e        | = <i>error</i>                        |

Koefisien determinasi  $R^2$  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen ( Imam Ghozali, 2011).

Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant* 5% .

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Data Umum

Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 33 Kabupaten dan Kota. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berada di tengah pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang menjadi populasi dari penelitian adalah 33 Kabupaten dan Kota, sebagai berikut :

- |                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Kab. Banjarnegara | 13. Kab. Klaten      | 25. Kab. Temanggung |
| 2. Kab. Banyumas     | 14. Kab. Kudus       | 26. Kab. Wonogiri   |
| 3. Kab. Batang       | 15. Kab. Magelang    | 27. Kab. Wonosobo   |
| 4. Kab. Blora        | 16. Kab. Pati        | 28. Kota Magelang   |
| 5. Kab. Boyolali     | 17. Kab. Pekalongan  | 29. Kota Pekalongan |
| 6. Kab. Brebes       | 18. Kab. Pemasang    | 30. Kota Salatiga   |
| 7. Kab. Cilacap      | 19. Kab. Purbalingga | 31. Kota Semarang   |
| 8. Kab. Demak        | 20. Kab. Purworejo   | 32. Kota Surakarta  |
| 9. Kab. Grobogan     | 21. Kab. Rembang     | 33. Kota Tegal      |
| 10. Kab. Jepara      | 22. Kab Semarang     |                     |
| 11. Kab. Kebumen     | 23. Kab Sragen       |                     |
| 12. Kab. Kendal      | 24. Kab. Tegal       |                     |

Data pada penelitian ini (N) sebanyak 132, data didapatkan dari laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2008-2011 yang seluruhnya menyampaikan laporan kepada situs Dirjen

Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008-2011, dan data Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan seleksi data, maka dapat diketahui terdapat data *outliers* pada penelitian. Data *outliers* adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data, data *outliers* yang memiliki karakteristik unik dihilangkan agar tidak mengganggu pengujian dalam penelitian ini.

**Tabel 5. Prosedur Penentuan Data.**

| <b>Prosedur Penentuan Data</b>         | <b>Jumlah</b> |
|--|---------------|
| 1. Laporan Realisasi APBD 2008-2011    | <b>140</b>    |
| 2. Data <i>Outliers</i>                | <b>(8)</b>    |
| <b>Total data yang dapat digunakan</b> | <b>132</b>    |

## 2. Data Khusus

Terdapat empat data dalam penelitian ini yaitu tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang di sajikan meliputi nilai minimal, maksimal, *mean* , dan standar deviasi.

Data khusus tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 selengkapnya disajikan pada

lampiran I pada halaman 77. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011, maka nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Rangkuman Data Khusus**

|     | N   | Minimum | Maksimum | <i>Mean</i> | Standar Deviasi |
|-----|-----|---------|----------|-------------|-----------------|
| PE  | 132 | 0,02    | 0,7      | 0,0488      | 0,00925         |
| PAD | 132 | 24,13   | 26,98    | 25,0387     | 0,43458         |
| DAU | 132 | 23,92   | 27,50    | 26,6260     | 0,89760         |
| BM  | 132 | 23,96   | 26,44    | 25,4414     | 0,41919         |

Sumber: *Output* SPSS 16.0, data sekunder yang diolah, 2013

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data penelitian yang ada, data dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS Statistik 16.0 *for windows*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 132. Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai nilai minimum 0.02 yang diperoleh Kabupaten Klaten pada tahun 2010 dan 2011, Kabupaten Grobogan pada tahun 2010, dan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2011. Nilai maksimum untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) yaitu 0.07 yang diperoleh Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang pada Tahun 2011. Nilai *mean* 0,0488, dan nilai standar deviasi 0,00925.

b. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data penelitian yang ada, data dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS Statistik 16.0 *for windows*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 132. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 24,13 atau sama dengan Rp. 30.096.000.000 diperoleh dari Kota Pekalongan pada tahun 2008 dan nilai maksimum sebesar 26,98 atau sama dengan Rp 521.538 000.000 diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2011. Nilai *mean* 25,0387, dan nilai standar deviasi 0,43458.

c. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan data penelitian yang ada, data dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS Statistik 16.0 *for windows*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 132, variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimum 23,92 atau sama dengan Rp. 24.388.000.000 yang diperoleh dari Kota Salatiga pada tahun 2009 dan nilai maksimum sebesar 27,50 atau sama dengan Rp. 876.994.000.000 yang diperoleh dari Kabupaten Cilacap pada Tahun 2011. Nilai *mean* 26,6260, dan nilai standar deviasi 0,89760.

d. Belanja Modal

Berdasarkan data penelitian yang ada, data dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS Statistik 16.0 *for windows*.

Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 132. Variabel Belanja Modal (BM) mempunyai nilai minimum 23,96 atau sama dengan Rp. 25.479.000.000 yang diperoleh dari Kabupaten Batang pada tahun 2010 dan nilai maksimum sebesar 26,44 atau sama dengan Rp.305.704.000.000 yang diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2011. Nilai *mean* 25,4414, dan nilai standar deviasi 0,41919.

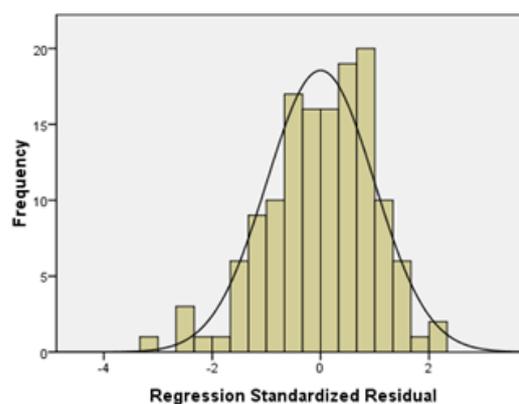
### 3. Analisis Data

#### a. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas Data

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal.

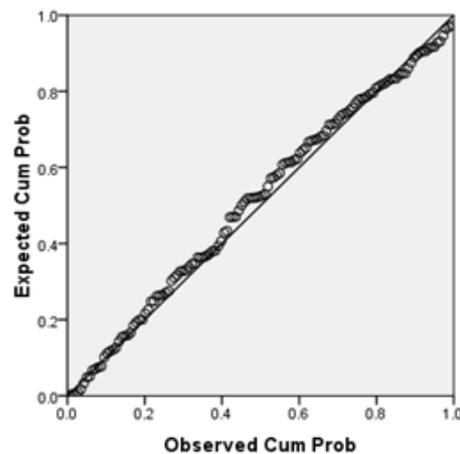
Dari hasil pengumpulan data sekunder untuk dilakukan uji normalitas dapat diperoleh grafik histogram sebagai berikut



**Gambar 2. Grafik Histogram Normalitas**

Sumber : *Output* SPSS 16.0, data sekunder yang diolah, 2013

Dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal untuk melihat normalitas data adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.



**Gambar 3. Uji Normalitas Dengan Normal P-Plot**

Sumber : *Output* SPSS 16.0, data sekunder yang diolah, 2013

Pada grafik normal probability plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi

ini memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sampel test Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi akan dipakai lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05

**Tabel 7. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

|  |                       | <i>Standardized Residual</i> |
|--|-----------------------|------------------------------|
| N                                      |                       | 132                          |
| <i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i> | <i>Mean</i>           | 0,0000000                    |
|  | <i>Std. Deviation</i> | 0,38719048                   |
| <i>Most Extreme Differences</i>        | <i>Absolute</i>       | 0,57                         |
|  | <i>Positive</i>       | 0,36                         |
|  | <i>Negative</i>       | -0,57                        |
| <i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>            |                       | 0,650                        |
| <i>Asym. Sig. (2-tailed)</i>           |                       | 0,792                        |

Sumber : *Output SPSS 16.0, data sekunder yang diolah, 2013*

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 7. Nilai Kolmogorov-Smirnov 0,650 dengan probabilitas signifikansi 0,792 lebih dari  $\alpha=0,05$  hal ini berarti data terdistribusi secara normal, hasilnya konsisten dengan uji grafik yang dilakukan sebelumnya, sehingga model regresi ini memenuhi uji normalitas.

## 2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Dikatakan terjadi multikolonieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60, dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas, lebih kecil atau sama dengan 0,60 (Danang Sunyoto, 2007). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Adapun hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut :

**Tabel 8. Uji Multikolonieritas Dengan Matriks Korelasi**

| Model                |     | DAU    | PE     | PAD    |
|----------------------|-----|--------|--------|--------|
| 1 <i>Correlation</i> | DAU | 1,000  | 0,35   | -0,241 |
|                      | PE  | 0,35   | 1,000  | -0,376 |
|                      | PAD | -0,241 | -0,376 | 1,000  |
| <i>Covariances</i>   | DAU | 0,002  | 0,005  | 0,000  |
|                      | PE  | 0,005  | 16,006 | -0,132 |
|                      | PAD | 0,000  | -0,132 | 0,008  |

Sumber: *Output* SPSS 16.0, data sekunder yang diolah

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat korelasi sebesar -0,376 atau sekitar 37,6%. Karena korelasi ini masih di bawah 0,60 atau 60%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.

Selain menggunakan matriks korelasi, multikolonieritas juga dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ( $VIF=1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10. Berikut hasil uji multikolonieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF :

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolonieritas Dengan Nilai *Tolerance* dan VIF**

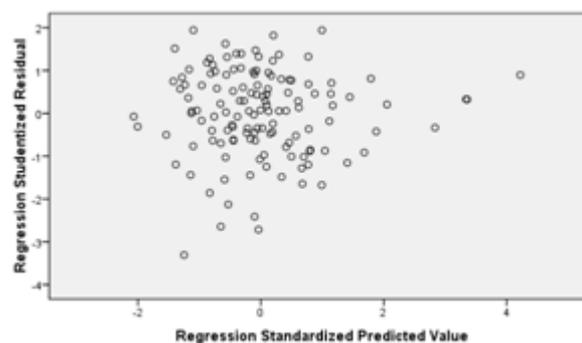
| Model | <i>Collinierity Statistic</i> |       |
|-------|-------------------------------|-------|
|       | <i>Tolerance</i>              | VIF   |
| PE    | 0,855                         | 1,169 |
| PAD   | 0,807                         | 1,240 |
| DAU   | 0,938                         | 1,066 |

Sumber: *Output* SPSS 16.0, data sekunder yang diolah

Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas ( Imam Ghozali, 2011). Di dalam pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut.



**Gambar 4. Diagram Heteroskestisitas**

Sumber. *Output* SPSS 16.0 , data sekunder yang diolah 2013

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized* (Imam Ghozali, 2011).

Dari gambar 4 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai uji Durbin –Watson (D-W).

**Tabel 10. Hasil uji autokorelasi**

| Model | Durbin- Watson |
|-------|----------------|
| 1     | 1,886          |

Sumber. *Output SPSS 16.0*, data sekunder yang diolah 2013

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 132 ( $n$ ) dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas ( $dU$ ) 1,774 dan batas bawah ( $dL$ ) 1,693. Karena nilai DW 1,886 lebih besar dari batas atas ( $dU$ ) 1,774 dan kurang dari  $4-1,774$  ( $4-dU$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

## b. Uji Hipotesis

### 1) Analisis Regresi Linier Sederhana

#### a) Uji Hipotesis Pertama

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) *for windows* 16 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 11. Hasil uji regresi linier sederhana variabel Pertumbuhan Ekonomi**

| Variabel                      | Koefisien Regresi ( <i>Beta</i> ) | $r_{xly}$ | $r^2_{xly}$ | Sig   | $t_{hitung}$ | Keterangan       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------|--------------|------------------|
| Konstanta                     | 25,285                            |           |             | 0,000 | 128,434      |                  |
| Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) | 3,206                             | 0,071     | 0,005       | 0,420 | 0,809        | Tidak Signifikan |

Sumber. *Output* SPSS 16.0 , data sekunder yang diolah 2013

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 11 di atas dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 25,285 + 3,206X_1$$

Nilai konstanta sebesar 25,285, hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 25,285 jika Pertumbuhan Ekonomi sama dengan nol. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi bertambah positif 3,206 menunjukkan bahwa apabila Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 3,206 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan

Variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x_1y}$ ) sebesar 0,071. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) sebesar 0,005 yang berarti 0,5% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan sisanya 99,5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai signifikansi sebesar 0,420, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  0,809 <  $t_{tabel}$  1,65685 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) tidak signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal adalah positif namun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pertumbuhan Ekonomi maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dapat diterima.

## b) Uji Hipotesis Kedua

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) *for windows* 16 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 12. Hasil uji regresi linier sederhana variabel Pendapatan Asli Daerah**

| Variabel                         | Koefisien Regresi ( <i>Beta</i> ) | $r_{x_2y}$ | $r^2_{x_2y}$ | Sig   | $t_{hitung}$ | Keterangan |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------|--------------|------------|
| Konstanta                        | 16,386                            |            |              | 0,000 | 8,343        |            |
| Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) | 0,362                             | 0,375      | 0,141        | 0,000 | 4,612        | Signifikan |

Sumber. *Output* SPSS 16.0 , data sekunder yang diolah 2013

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 12 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 16,383 + 0,362X_2$$

Nilai konstanta sebesar 16,383, hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 16,383 jika Pendapatan Asli Daerah sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,362, menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,362 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien

korelasi ( $r_{x_2y}$ ) sebesar 0,375. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ ) sebesar 0,141 yang berarti 14,1% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya 85,9% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  4,612 >  $t_{tabel}$  1,65685 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dapat diterima.

#### c) Pengujian Hipotesis ketiga

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) for windows 16 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 13. Hasil Uji regresi linier sederhana variabel Dana Alokasi Umum**

| Variabel                    | Koefisien Regresi ( <i>Beta</i> ) | $r_{x_3y}$ | $r^2_{x_3y}$ | Sig   | $t_{hitung}$ | Keterangan       |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------|--------------|------------------|
| Konstanta                   | 24,046                            |            |              | 0,000 | 22,176       |                  |
| Dana Alokasi Umum ( $X_3$ ) | 0,052                             | 0,112      | 0,013        | 0,200 | 1,288        | Tidak Signifikan |

Sumber. *Output* SPSS 16.0 , data sekunder yang diolah 2013

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 13 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 24,046 + 0,052X_3$$

Nilai konstanta sebesar 24,046, hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 24,046 jika Dana Alokasi Umum sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,052, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,052 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Dana Alokasi Umum ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x_3y}$ ) sebesar 0,112. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ ) sebesar 0,013 yang berarti 1,3% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat

dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya 98,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai signifikansi sebesar 0,200, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$   $1,288 < t_{tabel}$  1,65685 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum ( $X_3$ ) tidak signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah positif namun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dapat diterima.

## **2) Analisis Regresi Linier Berganda**

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) for windows 16 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 14. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

| Variabel Independen              | Koefisien Regresi ( <i>Beta</i> ) | $R_{y(1,2,3)}$ | $R^2_{y(1,2,3)}$ | Sig.  | $F_{hitung}$ | Keterangan |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|--------------|------------|
| Konstanta                        | 15,693                            | 0,383          | 0,147            | 0,000 | 7,344        | Signifikan |
| Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ )    | 0,071                             |                |                  |       |              |            |
| Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) | 0,375                             |                |                  |       |              |            |
| Dana Alokasi Umum ( $X_3$ )      | 0,112                             |                |                  |       |              |            |

Sumber. *Output* SPSS 16.0 , data sekunder yang diolah 2013

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 14 di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = 15,693 + 0,071PE + 0,375PAD + 0,112 \text{ DAU}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan :

- a) Konstanta sebesar 15,693 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ( $X_1=0$ ,  $X_2=0$ , dan  $X_3=0$ ), maka Belanja Modal tiap daerah sebesar 15,693.
- b) Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (PE) bertambah sebesar 0,071 artinya apabila terjadi perubahan PE sebesar 1% akan menambah Belanja Modal sebesar 0,071 atau 7,1%

- c) Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 0,375, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,375 atau 37,5%.
- d) Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah sebesar 0,112, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,112 atau 11,2%.

Secara bersama-sama/simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,383. Besarnya koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) adalah 0,147, hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 14,7%, sedangkan sisanya sebesar 85,3% (100%-14,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Hasil pengujian statistik uji F dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, dan diketahui  $F_{tabel}$  yaitu 2,67 dan  $F_{hitung}$  sebesar 7,344 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yang berarti secara simultan seluruh variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan dapat disimpulkan hipotesis empat diterima.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal”. Hasil pengujian statistik menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x_1y}$ ) sebesar 0,071. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) sebesar 0,005. Nilai signifikansi sebesar 0,420, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$   $0,809 < t_{tabel}$  1,6568. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pertumbuhan Ekonomi maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pada dasarnya Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Sebagian besar Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan membaiknya ekonomi global dan domestik.

Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasar analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal”, terbukti Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) sebesar 0,375. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ ) sebesar 0,141. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini jauh lebih rendah

dibandingkan dengan 0,05. Nilai  $t_{hitung} 4,612 > t_{tabel} 1,65685$ . Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dan penelitian yang dilakukan oleh Farah Marta Yovita (2011) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya. Menurut Abdul Halim (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sholikin Bratakusuma (2003) mengartikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah. Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan lain-lain. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang baik serta diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka

akan meningkatkan Belanja Modal dalam Daerah tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang benar maka akan semakin besar dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal dengan demikian  $H_2$  diterima.

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “ Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dalam pengujian statistik secara parsial menunjukkan koefisien korelasi ( $r_{x_3y}$ ) sebesar 0,112. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ ) sebesar 0,013. Nilai signifikansi sebesar 0,200, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Nilai  $t_{hitung}$   $1,288 < t_{tabel}$  1,65685 maka Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah positif namun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah, dibuktikan  $H_3$  diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2009) yang menyebutkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dan merupakan konsekuensi penyerahan kewenangan pusat terhadap daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau pelayanan lain. Dana Alokasi Umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Transfer ini merupakan dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah.

#### **4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Simultan terhadap Belanja Modal**

Pada uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen yaitu variabel Belanja Modal membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,383 dan besarnya koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) adalah 0,147. Hasil pengujian statistik uji F dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05,  $F_{tabel}$  yaitu 2,67 dan  $F_{hitung}$  sebesar 7,344 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yang

berarti secara simultan seluruh variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) serta penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan pembangunan, hal ini diperlukan dengan adanya penambahan penduduk. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya insfrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah, baisanya jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka pemerintah daerah akan meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi sarana prasarana dan insfrastruktur, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

Daerah yang ditunjang dengan saran dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanam modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal oleh pemerintah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan. Hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian  $H_4$  yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” diterima.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Peneliti hanya mengambil 3 variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
2. Periode penelitian ini hanya dari tahun 2008-2011.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x1y}$ ) sebesar 0,071. Koefisien determinasi ( $r^2_{x1y}$ ) sebesar 0,005. Nilai signifikansi sebesar 0,420, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  0,809 <  $t_{tabel}$  1,65685.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x2y}$ ) sebesar 0,375, koefisien determinasi ( $r^2_{x2y}$ ) sebesar 0,141. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  4,612 >  $t_{tabel}$  1,65685.
3. Dana Alokasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x3y}$ ) sebesar 0,112, koefisien determinasi ( $r^2_{x3y}$ ) sebesar 0,013. Nilai signifikansi sebesar 0,200, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  1,288 <  $t_{tabel}$  1,65685.

4. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini di tunjukkan dengan koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,383 dan besarnya koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) adalah 0,147. Hasil pengujian statistik uji F dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, dan diketahui  $F_{tabel}$  yaitu 2,67 dan  $F_{hitung}$  sebesar 7,344 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$ .

## **B. Saran**

Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Belanja Modal maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum agar Belanja Modal setiap periodenya bisa bertambah.
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dilihat dari nilai Pertumbuhan Ekonomi agar tercipta keseimbangan yang baik antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal, karena naiknya Pertumbuhan Ekonomi yang baik akan diikuti dengan kenaikan Belanja Modal.

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih, dan mengambil sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
5. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Bambang Kesit Prakosa. (2004). “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8, 1001-118.
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Danang Sunyoto. (2007). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat*. Penerbit Amara Books. Yogyakarta.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- David Harianto & Priyo Hari Adi (2006). “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah”. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Farah Marta Yovita. (2011). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia)”. *Skripsi Universitas Negeri Diponegoro*. Semarang.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Juli Panglima Saranggih. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mudrajat Kuncoro. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Nugroho Suratno Putro. (2009). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian

Anggaran Belanja Modal”. *Skripsi*. Universitas Negeri Diponegoro. Semarang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007.

Sadono Sukirno. (1991). *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Kebijakan*. Penerbit FE-UI dan Bina Grafika. Jakarta

Sholikin Bratakusuma. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: penerbit Alfabeta.

Syukriy Abdullah dan Abdul Halim. (2004). “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah” *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal 1140-1159.

UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[www.dpjk.depkeu.go.id](http://www.dpjk.depkeu.go.id). Diakses 15 Februari 2013

# LAMPIRAN I

Tabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan  
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan  
Belanja Modal Tahun 2008-2011

Tabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan Belanja Modal  
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Kabupaten dan Kota | PE   | PAD     | DAU     | BM      |
|----|--------------------|------|---------|---------|---------|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 0,05 | 46.521  | 488.708 | 138.287 |
| 2  | Kab. Banyumas      | 0,05 | 107.426 | 702.152 | 154.241 |
| 3  | Kab. Batang        | 0,04 | 41.193  | 401.575 | 119.144 |
| 4  | Kab. Boyolali      | 0,04 | 63.733  | 582.512 | 124.533 |
| 5  | Kab. Blora         | 0,06 | 48.954  | 478.260 | 141.457 |
| 6  | Kab. Brebes        | 0,05 | 72.074  | 716.427 | 195.182 |
| 7  | Kab. Jepara        | 0,04 | 71.268  | 505.641 | 156.370 |
| 8  | Kab. Cilacap       | 0,05 | 102.780 | 773.079 | 277.402 |
| 9  | Kab. Demak         | 0,04 | 43.821  | 483.239 | 112.694 |
| 10 | Kab. Grobogan      | 0,05 | 59.925  | 615.030 | 183.054 |
| 11 | Kab. Kebumen       | 0,06 | 58.599  | 616.395 | 160.041 |
| 12 | Kab. Kendal        | 0,04 | 71.685  | 490.895 | 116.591 |
| 13 | Kab. Klaten        | 0,04 | 49.550  | 744.677 | 144.478 |
| 14 | Kab. Kudus         | 0,04 | 71.520  | 460.541 | 165.756 |
| 15 | Kab. Magelang      | 0,05 | 78.120  | 588.002 | 121.810 |
| 16 | Kab. Pati          | 0,05 | 80.495  | 603.264 | 162.415 |
| 17 | Kab. Pemasang      | 0,05 | 66.747  | 577.865 | 135.100 |
| 18 | Kab. Purbalingga   | 0,05 | 63.799  | 458.205 | 180.387 |
| 19 | Kab. Pekalongan    | 0,05 | 55.279  | 465.324 | 96.601  |
| 20 | Kab. Purworejo     | 0,06 | 51.175  | 515.796 | 106.615 |
| 21 | Kab. Rembang       | 0,05 | 51.126  | 398.411 | 123.251 |
| 22 | Kab. Semarang      | 0,04 | 82.943  | 491.166 | 164.117 |
| 23 | Kab. Sragen        | 0,06 | 65.803  | 551.266 | 170.554 |
| 24 | Kab. Tegal         | 0,05 | 59.155  | 606.452 | 191.884 |
| 25 | Kab. Temanggung    | 0,04 | 37.924  | 421.056 | 119.138 |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 0,04 | 54.129  | 598.933 | 144.349 |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 0,04 | 38.158  | 427.667 | 160.950 |
| 28 | Kota Magelang      | 0,05 | 40.506  | 256.525 | 72.452  |
| 29 | Kota Pekalongan    | 0,04 | 30.096  | 264.052 | 104.149 |
| 30 | Kota Salatiga      | 0,05 | 45.147  | 225.385 | 126.481 |
| 31 | Kota Semarang      | 0,06 | 267.914 | 634.864 | 155.066 |
| 32 | Kota Surakarta     | 0,06 | 102.990 | 420.912 | 163.615 |
| 33 | Kota Tegal         | 0,05 | 69.567  | 236.194 | 94.110  |

Keterangan : PAD, DAU dan BM dalam jutaan rupiah

Tabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan Belanja Modal  
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2009

| No | Kabupaten dan Kota | PE   | PAD     | DAU     | BM      |
|----|--------------------|------|---------|---------|---------|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 0,05 | 60.637  | 38.698  | 77.400  |
| 2  | Kab. Banyumas      | 0,05 | 120.520 | 735.150 | 144.954 |
| 3  | Kab. Batang        | 0,04 | 44.644  | 416.406 | 97.245  |
| 4  | Kab. Blora         | 0,05 | 49.696  | 72.047  | 69.902  |
| 5  | Kab. Boyolali      | 0,05 | 70.005  | 586.021 | 86.597  |
| 6  | Kab. Brebes        | 0,05 | 80.275  | 50.403  | 130.717 |
| 7  | Kab. Cilacap       | 0,05 | 120.746 | 782.144 | 176.603 |
| 8  | Kab. Demak         | 0,04 | 50.236  | 39.864  | 153.086 |
| 9  | Kab. Grobogan      | 0,05 | 77.080  | 52.672  | 97.472  |
| 10 | Kab. Jepara        | 0,05 | 71.920  | 47.779  | 90.748  |
| 11 | Kab. Kebumen       | 0,04 | 63.016  | 37.293  | 159.361 |
| 12 | Kab. Kendal        | 0,06 | 76.806  | 512.809 | 110.891 |
| 13 | Kab. Klaten        | 0,04 | 53.143  | 726.193 | 68.466  |
| 14 | Kab. Kudus         | 0,04 | 83.046  | 471.869 | 252.376 |
| 15 | Kab. Magelang      | 0,05 | 75.582  | 44.986  | 108.098 |
| 16 | Kab. Pati          | 0,05 | 90.668  | 55.088  | 161.129 |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 0,04 | 58.468  | 475.248 | 102.433 |
| 18 | Kab. Pemasang      | 0,05 | 81.819  | 40.793  | 126.532 |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 0,06 | 83.177  | 462.101 | 114.668 |
| 20 | Kab. Purworejo     | 0,05 | 60.814  | 35.089  | 110.020 |
| 21 | Kab. Rembang       | 0,04 | 56.888  | 36.162  | 56.894  |
| 22 | Kab. Semarang      | 0,04 | 90.390  | 508.705 | 91.708  |
| 23 | Kab. Sragen        | 0,06 | 72.681  | 35.698  | 102.237 |
| 24 | Kab. Tegal         | 0,05 | 70.860  | 40.877  | 142.099 |
| 25 | Kab. Temanggung    | 0,04 | 47.327  | 430.269 | 95.106  |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 0,05 | 57.093  | 38.553  | 84.544  |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 0,04 | 46.325  | 35.650  | 195.980 |
| 28 | Kota Magelang      | 0,05 | 47.705  | 256.728 | 93.401  |
| 29 | Kota Pekalongan    | 0,05 | 32.238  | 265.361 | 78.256  |
| 30 | Kota Salatiga      | 0,04 | 53.056  | 24.388  | 150.495 |
| 31 | Kota Semarang      | 0,05 | 306.112 | 256.042 | 216.894 |
| 32 | Kota Surakarta     | 0,06 | 101.972 | 435.471 | 81.881  |
| 33 | Kota Tegal         | 0,05 | 90.841  | 241.785 | 122.611 |

Keterangan : PAD, DAU dan BM dalam jutaan rupiah

Tabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan Belanja Modal  
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2010

| No | Kabupaten dan Kota | PE   | PAD     | DAU     | BM      |
|----|--------------------|------|---------|---------|---------|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 0,05 | 62.487  | 506.783 | 155.215 |
| 2  | Kab. Banyumas      | 0,06 | 164.892 | 720.191 | 103.063 |
| 3  | Kab. Batang        | 0,05 | 45.422  | 414.494 | 25.479  |
| 4  | Kab. Blora         | 0,05 | 47.088  | 487.917 | 53.347  |
| 5  | Kab. Boyolali      | 0,04 | 86.486  | 587.574 | 100.101 |
| 6  | Kab. Brebes        | 0,05 | 71.025  | 738.270 | 131.399 |
| 7  | Kab Cilacap        | 0,06 | 149.709 | 793.267 | 163.912 |
| 8  | Kab. Demak         | 0,04 | 56.756  | 493.497 | 126.893 |
| 9  | Kab. Grobogan      | 0,02 | 78.366  | 617.827 | 91.688  |
| 10 | Kab. Jepara        | 0,05 | 84.713  | 670.275 | 119.766 |
| 11 | Kab. Kebumen       | 0,04 | 58.742  | 642.798 | 118.772 |
| 12 | Kab. Kendal        | 0,06 | 86.235  | 520.677 | 134.271 |
| 13 | Kab. Klaten        | 0,02 | 54.886  | 726.234 | 40.142  |
| 14 | Kab. Kudus         | 0,04 | 94.033  | 463.013 | 165.093 |
| 15 | Kab. Magelang      | 0,05 | 76.058  | 604.522 | 97.926  |
| 16 | Kab Pati           | 0,05 | 112.527 | 620.577 | 68.355  |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 0,04 | 67.580  | 490.039 | 73.291  |
| 18 | Kab. Pemasang      | 0,05 | 76.441  | 619.896 | 77.174  |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 0,06 | 79.803  | 464.789 | 43.188  |
| 20 | Kab. Purworejo     | 0,05 | 69.609  | 528.061 | 62.069  |
| 21 | Kab. Rembang       | 0,04 | 65.699  | 411.435 | 92.130  |
| 22 | Kab. Semarang      | 0,05 | 98.831  | 508.915 | 76.039  |
| 23 | Kab. Sragen        | 0,06 | 79.627  | 561.675 | 86.364  |
| 24 | Kab. Tegal         | 0,05 | 73.063  | 640.042 | 131.061 |
| 25 | Kab. Temanggung    | 0,04 | 55.211  | 438.091 | 44.834  |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 0,06 | 64.969  | 616.996 | 103.312 |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 0,04 | 52.079  | 442.370 | 39.161  |
| 28 | Kota Magelang      | 0,06 | 59.548  | 260.113 | 47.661  |
| 29 | Kota Pekalongan    | 0,06 | 47.496  | 266.793 | 56.559  |
| 30 | Kota Salatiga      | 0,05 | 51.550  | 238.069 | 89.643  |
| 31 | Kota Semarang      | 0,06 | 327.992 | 640.186 | 216.489 |
| 32 | Kota Surakarta     | 0,06 | 113.946 | 499.448 | 79.762  |
| 33 | Kota Tegal         | 0,05 | 101.322 | 244.581 | 66.120  |

Keterangan : PAD, DAU dan BM dalam jutaan rupiah

Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan Belanja Modal

Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2011

| <b>NO</b> | <b>Kabupaten dan Kota</b> | <b>PE</b> | <b>PAD</b> | <b>DAU</b> | <b>BM</b> |
|-----------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1         | Kab. Banjarnegara         | 0,05      | 71.107     | 562.288    | 160.076   |
| 2         | Kab. Banyumas             | 0,06      | 191.900    | 835.610    | 169.316   |
| 3         | Kab. Batang               | 0,05      | 60.155     | 472.131    | 88.042    |
| 4         | Kab. Blora                | 0,03      | 67.022     | 547.170    | 105.829   |
| 5         | Kab. Boyolali             | 0,05      | 96.738     | 641.483    | 138.437   |
| 6         | Kab. Brebes               | 0,05      | 78.276     | 800.183    | 142.729   |
| 7         | Kab. Cilacap              | 0,06      | 172.327    | 876.994    | 203.565   |
| 8         | Kab. Demak                | 0,04      | 74.559     | 544.460    | 234.922   |
| 9         | Kab. Grobogan             | 0,07      | 87.912     | 668.995    | 161.322   |
| 10        | Kab. Jepara               | 0,05      | 103.642    | 592.164    | 212.928   |
| 11        | Kab. Kebumen              | 0,05      | 73.513     | 731.981    | 187.138   |
| 12        | Kab. Kendal               | 0,06      | 93.290     | 569.224    | 199.990   |
| 13        | Kab. Klaten               | 0,02      | 72.291     | 793.293    | 130.546   |
| 14        | Kab. Kudus                | 0,04      | 108.459    | 488.820    | 125.457   |
| 15        | Kab. Magelang             | 0,04      | 960.463    | 668.922    | 84.900    |
| 16        | Kab. Pati                 | 0,05      | 134.476    | 692.179    | 89.665    |
| 17        | Kab. Pekalongan           | 0,05      | 81.363     | 553.660    | 97.246    |
| 18        | Kab. Pemasang             | 0,05      | 79.678     | 672.430    | 128.206   |
| 19        | Kab. Purbalingga          | 0,06      | 94.946     | 521.932    | 66.386    |
| 20        | Kab. Purworejo            | 0,05      | 88.942     | 585.851    | 87.865    |
| 21        | Kab. Rembang              | 0,04      | 73.932     | 468.745    | 187.993   |
| 22        | Kab. Semarang             | 0,06      | 133.199    | 567.856    | 160.539   |
| 23        | Kab. Sragen               | 0,07      | 94.519     | 618.443    | 70.837    |
| 24        | Kab. Tegal                | 0,05      | 90.133     | 703.779    | 145.856   |
| 25        | Kab. Temanggung           | 0,05      | 62.343     | 482.938    | 93.034    |
| 26        | Kab. Wonogiri             | 0,02      | 77.142     | 68.033     | 11.320    |
| 27        | Kab. Wonosobo             | 0,05      | 67.399     | 485.766    | 119.761   |
| 28        | Kota Magelang             | 0,05      | 63.558     | 292.580    | 81.027    |
| 29        | Kota Pekalongan           | 0,05      | 63.345     | 293.530    | 82.344    |
| 30        | Kota Salatiga             | 0,06      | 60.611     | 262.653    | 77.409    |
| 31        | Kota Semarang             | 0,07      | 521.538    | 715.701    | 305.704   |
| 32        | Kota Surakarta            | 0,06      | 181.097    | 473.889    | 128.443   |

| <b>NO</b> | <b>Kabupaten dan Kota</b> | <b>PE</b> | <b>PAD</b> | <b>DAU</b> | <b>BM</b> |
|-----------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 33        | Kota tegal                | 0,05      | 117.244    | 265.483    | 93.963    |

Keterangan PAD, DAU dan BM dalam jutaan rupiah

# LAMPIRAN II

Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2008-2011

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH

TAHUN 2008

| No | Kabupaten dan Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Pendapatan Pajak Daerah | Pendapatan Retribusi Daerah | Pendapatan Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Lain-lain PAD yang sah |
|----|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 46.521                 | 7.315                   | 27.230                      | 1.747  | 10.229                 |
| 2  | Kab. Banyumas      | 107.426                | 21.342                  | 63.896                      | 4.947  | 17.241                 |
| 3  | Kab. Blora         | 48.954                 | 7.009                   | 21.593                      | 1.929  | 18.423                 |
| 4  | Kab. Batang        | 41.193                 | 9.112                   | 20.812                      | 1.156  | 10.112                 |
| 5  | Kab. Brebes        | 72.074                 | 14.631                  | 26.720                      | 2.497  | 28.226                 |
| 6  | Kab. Boyolali      | 63.733                 | 11.155                  | 38.960                      | 2.752  | 10.866                 |
| 7  | Kab. Cilacap       | 102.780                | 41.104                  | 40.020                      | 4.220  | 17.437                 |
| 8  | Kab. Demak         | 43.821                 | 9.960                   | 19.902                      | 2.177  | 11.783                 |
| 9  | Kab. Grobogan      | 59.925                 | 9.164                   | 29.910                      | 2.445  | 18.405                 |
| 10 | Kab. Jepara        | 71.268                 | 13.941                  | 44.637                      | 2.332  | 10.358                 |
| 11 | Kab. Kebumen       | 58.510                 | 10.984                  | 26.653                      | 1.397  | 19.565                 |
| 12 | Kab. Kendal        | 71.685                 | 19.836                  | 30.029                      | 2.876  | 18.943                 |
| 13 | Kab. Klaten        | 49.550                 | 18.027                  | 10.463                      | 3.324  | 17.735                 |
| 14 | Kab. Kudus         | 71.520                 | 15.746                  | 44.429                      | 1.895  | 9.451                  |
| 15 | Kab. Magelang      | 78.120                 | 25.207                  | 30.456                      | 7.580  | 14.876                 |
| 16 | Kab. Pati          | 80.495                 | 12.570                  | 50.984                      | 2.856  | 14.086                 |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 55.279                 | 9.522                   | 36.267                      | 1.774  | 7.716                  |
| 18 | Kab. Pemasang      | 66.747                 | 10.325                  | 35.497                      | 3.669  | 17.257                 |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 63.799                 | 9.575                   | 37.427                      | 6.096  | 10.701                 |
| 20 | Kab. Purworejo     | 51.175                 | 6.402                   | 34.467                      | 1.455  | 8.850                  |

| No | Kabupaten dan Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Pendapatan Pajak Daerah | Pendapatan Retribusi Daerah | Pendapatan Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Lain-lain PAD yang sah |
|----|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| 21 | Kab. Rembang       | 51.126                 | 7.622                   | 33.260                      | 4.467  | 5.777                  |
| 22 | Kab. Semarang      | 82.943                 | 17.944                  | 42.500                      | 2.909  | 19.590                 |
| 23 | Kab. Sragen        | 65.803                 | 11.958                  | 37.084                      | 4.505  | 12.256                 |
| 24 | Kab. Tegal         | 59.155                 | 13.211                  | 31.303                      | 3.715  | 10.926                 |
| 25 | Kab. Temanggung    | 37.924                 | 5.820                   | 20.067                      | 3.082  | 8.955                  |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 54.129                 | 8.055                   | 18.624                      | 4.617  | 22.832                 |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 38.158                 | 5.886                   | 14.198                      | 1.762  | 16.312                 |
| 28 | Kota Magelang      | 40.507                 | 5.423                   | 24.754                      | 2.906  | 7.424                  |
| 29 | Kota Pekalongan    | 30.096                 | 10.176                  | 7.638                       | 1.039  | 11.241                 |
| 30 | Kota Salatiga      | 45.147                 | 7.996                   | 22.322                      | 1.452  | 13.378                 |
| 31 | Kota Semarang      | 267.914                | 143.460                 | 84.757                      | 5.405  | 34.291                 |
| 32 | Kota Surakarta     | 102.990                | 46.856                  | 39.447                      | 4.067  | 12.620                 |
| 33 | Kota Tegal         | 69.567                 | 10.694                  | 40.043                      | 728  | 18.101                 |

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2009

| No | Kabupaten dan Kota | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH | Pajak<br>Daerah | Retribusi<br>Daerah | Hasil Pengelolaan<br>Kekayaan Daerah<br>yang Dipisahkan | Lain-lain<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Yang Sah |
|----|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---|---|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 60.637                    | 8.161           | 39.105              | 3.620   | 9.751   |
| 2  | Kab. Banyumas      | 120.520                   | 23.498          | 26.894              | 5.977   | 64.151  |
| 3  | Kab. Batang        | 44.644                    | 9.102           | 22.765              | 1.410   | 11.367  |
| 4  | Kab. Blora         | 49.696                    | 8.117           | 23.542              | 2.291   | 15.746  |
| 5  | Kab. Boyolali      | 70.005                    | 12.897          | 43.917              | 3.335   | 9.856   |
| 6  | Kab. Brebes        | 80.274                    | 15.405          | 39.384              | 2.304   | 23.181  |
| 7  | Kab. Cilacap       | 120.747                   | 44.267          | 51.795              | 4.835   | 19.850  |
| 8  | Kab. Demak         | 50.236                    | 13.059          | 25.779              | 3.111   | 8.287   |
| 9  | Kab. Grobogan      | 77.080                    | 11.177          | 46.189              | 5.067   | 14.647  |
| 10 | Kab. Jepara        | 71.920                    | 16.025          | 9.296               | 2.526   | 44.073  |

| <b>No</b> | <b>Kabupaten dan Kota</b> | <b>PENDAPATAN<br/>ASLI DAERAH</b> | <b>Pajak<br/>Daerah</b> | <b>Retribusi<br/>Daerah</b> | <b>Hasil Pengelolaan<br/>Kekayaan Daerah<br/>yang Dipisahkan</b> | <b>Lain-lain<br/>Pendapatan Asli<br/>Daerah Yang Sah</b> |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| 11        | Kab. Kebumen              | 63.018                            | 10.965                  | 32.553                      | 1.683  | 17.817   |
| 12        | Kab. Kendal               | 76.806                            | 19.576                  | 38.433                      | 3.597  | 15.200   |
| 13        | Kab. Klaten               | 53.142                            | 18.921                  | 11.039                      | 4.101  | 19.081   |
| 14        | Kab. Kudus                | 83.046                            | 19.593                  | 46.877                      | 2.447  | 14.129   |
| 15        | Kab. Magelang             | 75.581                            | 21.981                  | 33.412                      | 8.406  | 11.782   |
| 16        | Kab. Pati                 | 90.667                            | 14.590                  | 55.228                      | 5.189  | 15.660   |
| 17        | Kab. Pekalongan           | 58.468                            | 10.193                  | 40.970                      | 2.273  | 5.032  |
| 18        | Kab. Pemalang             | 81.819                            | 11.783                  | 39.554                      | 5.780  | 24.702   |
| 19        | Kab. Purbalingga          | 83.177                            | 10.934                  | 53.214                      | 7.552  | 11.477   |
| 20        | Kab. Purworejo            | 60.814                            | 6.819                   | 9.491                       | 1.516  | 42.988   |
| 21        | Kab. Rembang              | 56.888                            | 9.860                   | 36.009                      | 4.585  | 6.434  |
| 22        | Kab. Semarang             | 90.390                            | 20.439                  | 52.202                      | 4.019  | 13.730   |

| No | Kabupaten dan Kota | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH | Pajak<br>Daerah | Retribusi<br>Daerah | Hasil<br>Pengelolaan<br>Kekayaan<br>Daerah yang<br>Dipisahkan | Lain-lain<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Yang Sah |
|----|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---|---|
| 23 | Kab. Sragen        | 72.682                    | 16.248          | 13.972              | 4.663   | 37.799  |
| 24 | Kab. Tegal         | 70.859                    | 14.046          | 10.166              | 4.450   | 42.197  |
| 25 | Kab. Temanggung    | 47.328                    | 6.195           | 25.975              | 3.879   | 11.279  |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 57.092                    | 8.669           | 19.704              | 4.665   | 24.054  |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 46.325                    | 5.685           | 29.402              | 3.096   | 8.142   |
| 28 | Kota Magelang      | 47.705                    | 5.970           | 4.490               | 2.985   | 34.260  |
| 29 | Kota Pekalongan    | 32.238                    | 11.070          | 8.373               | 1.543   | 11.252  |
| 30 | Kota Salatiga      | 53.055                    | 9.201           | 6.843               | 1.638   | 35.373  |
| 31 | Kota Semarang      | 306.112                   | 154.505         | 69.874              | 5.468   | 76.265  |
| 32 | Kota Surakarta     | 101.972                   | 52.164          | 37.783              | 3.458   | 8.567   |
| 33 | Kota Tegal         | 90.841                    | 11.910          | 9.419               | 711   | 68.801  |

Keterangan : dalam jutaan rupiah

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2010

| No | Kabupaten dan Kota | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH | Pajak<br>Daerah | Retribusi<br>Daerah | Hasil Pengelolaan<br>Kekayaan<br>Daerah yang<br>Dipisahkan | Lain-lain<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Yang Sah |
|----|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--|---|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 62.487                    | 9.265           | 39.761              | 3.349  | 10.112  |
| 2  | Kab. Banyumas      | 164.892                   | 29.101          | 34.543              | 6.512  | 94.736  |
| 3  | Kab. Batang        | 45.422                    | 10.056          | 24.688              | 2.676  | 8.002   |
| 4  | Kab. Blora         | 47.088                    | 9.427           | 23.935              | 3.223  | 10.503  |
| 5  | Kab. Boyolali      | 86.486                    | 14.094          | 25.383              | 4.513  | 42.495  |
| 6  | Kab. Brebes        | 71.025                    | 16.181          | 32.902              | 2.287  | 19.656  |
| 7  | Kab Cilacap        | 149.709                   | 46.310          | 40.808              | 5.195  | 57.396  |
| 8  | Kab. Demak         | 56.756                    | 13.473          | 13.473              | 4.036  | 8.944   |
| 9  | Kab. Grobogan      | 78.366                    | 15.105          | 48.750              | 5.139  | 9.373   |
| 10 | Kab. Jepara        | 84.713                    | 18.703          | 10.572              | 3.128  | 52.310  |
| 11 | Kab. Kebumen       | 58.742                    | 12.766          | 35.327              | 1.957  | 8.692   |
| 12 | Kab. Kendal        | 86.235                    | 23.672          | 16.015              | 4.482  | 42.066  |
| 13 | Kab. Klaten        | 54.886                    | 19.550          | 14.765              | 3.995  | 16.576  |
| 14 | Kab. Kudus         | 94.033                    | 21.682          | 55.624              | 3.880  | 12.848  |
| 15 | Kab. Magelang      | 76.058                    | 22.351          | 36.812              | 6.721  | 10.174  |
| 16 | Kab Pati           | 112.527                   | 17.694          | 17.157              | 4.233  | 73.433  |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 67.580                    | 10.686          | 48.127              | 2.201  | 6.565   |

| No | Daerah           | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH | Pajak<br>Daerah | Retribusi<br>Daerah | Hasil<br>Pengelolaan<br>Kekayaan<br>Daerah yang<br>Dipisahkan | Lain-lain<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Yang Sah |
|----|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---|---|
| 18 | Kab. Pemalang    | 76.441                    | 12.970          | 44.575              | 5.306   | 13.590  |
| 19 | Kab. Purbalingga | 79.803                    | 11.371          | 55.759              | 7.739   | 4.934   |
| 20 | Kab. Purworejo   | 69.609                    | 8.285           | 11.574              | 2.399   | 47.351  |
| 21 | Kab. Rembang     | 65.699                    | 13.358          | 19.173              | 4.124   | 29.045  |
| 22 | Kab. Semarang    | 98.831                    | 26.299          | 59.029              | 4.510   | 9.063   |
| 23 | Kab. Sragen      | 79.627                    | 17.659          | 16.695              | 5.277   | 39.996  |
| 24 | Kab. Tegal       | 73.063                    | 14.464          | 10.184              | 4.316   | 44.098  |
| 25 | Kab. Temanggung  | 55.211                    | 7.389           | 33.365              | 5.402   | 9.054   |
| 26 | Kab. Wonogiri    | 64.969                    | 9.599           | 27.916              | 5.101   | 22.352  |
| 27 | Kab. Wonosobo    | 52.079                    | 6.736           | 36.329              | 3.771   | 5.423   |
| 28 | Kota Magelang    | 59.548                    | 6.718           | 4.619               | 3.144   | 45.067  |
| 29 | Kota Pekalongan  | 47.496                    | 12.350          | 13.647              | 1.441   | 20.057  |
| 30 | Kota Salatiga    | 51.550                    | 9.206           | 7.283               | 2.469   | 32.591  |
| 31 | Kota Semarang    | 327.992                   | 177.680         | 80.560              | 6.210   | 63.542  |
| 32 | Kota Surakarta   | 113.946                   | 61.642          | 41.588              | 4.984   | 5.732   |
| 33 | Kota Tegal       | 101.322                   | 13.101          | 9.578               | 675   | 77.968  |

Keterangan : dalam Jutaan Rupiah

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2011

| No | Daerah            | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH | Pajak<br>Daerah | Retribusi<br>Daerah | Hasil Pengelolaan<br>Kekayaan Daerah<br>yang Dipisahkan | Lain-lain<br>Pendapatan<br>Asli Daerah<br>Yang Sah |
|----|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 1  | Kab. Banjarnegara | 71.107                    | 12.377          | 42.227              | 3.988   | 12.516   |
| 2  | Kab. Banyumas     | 191.900                   | 45.246          | 43.420              | 7.341   | 95.893   |
| 3  | Kab. Batang       | 60.155                    | 14.380          | 29.644              | 3.268   | 12.863   |
| 4  | Kab. Blora        | 67.022                    | 11.177          | 8.747               | 5.885   | 41.213   |
| 5  | Kab. Boyolali     | 96.738                    | 19.257          | 20.137              | 4.514   | 52.830   |
| 6  | Kab. Brebes       | 78.276                    | 20.958          | 13.912              | 2.766   | 40.639   |
| 7  | Kab. Cilacap      | 172.327                   | 59.511          | 41.413              | 6.080   | 65.322   |
| 8  | Kab. Demak        | 74.559                    | 24.451          | 11.080              | 4.796   | 34.232   |
| 9  | Kab. Grobogan     | 87.912                    | 14.990          | 14.262              | 5.896   | 52.765   |
| 10 | Kab. Jepara       | 103.642                   | 25.002          | 13.779              | 3.691   | 61.149   |
| 11 | Kab. Kebumen      | 73.513                    | 17.327          | 16.417              | 2.754   | 37.015   |
| 12 | Kab. Kendal       | 93.290                    | 25.891          | 14.743              | 3.293   | 49.363   |
| 13 | Kab. Klaten       | 72.291                    | 28.262          | 15.533              | 3.796   | 24.700   |
| 14 | Kab. Kudus        | 108.459                   | 36.688          | 54.599              | 4.619   | 12.553   |

| No | Daerah           | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH | Pajak<br>Daerah | Retribusi<br>Daerah | Hasil<br>Pengelolaan<br>Kekayaan<br>Daerah yang<br>Dipisahkan | Lain-lain<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Yang<br>Sah |
|----|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 15 | Kab. Magelang    | 960.463                   | 29.334          | 37.114              | 7.902   | 16.113   |
| 16 | Kab. Pati        | 134.476                   | 30.247          | 21.566              | 4.047   | 78.615   |
| 17 | Kab. Pekalongan  | 81.363                    | 15.090          | 58.776              | 1.969   | 5.527  |
| 18 | Kab. Pemasang    | 79.678                    | 15.848          | 42.210              | 8.780   | 12.840   |
| 19 | Kab. Purbalingga | 94.946                    | 15.894          | 62.833              | 8.182   | 8.038  |
| 20 | Kab. Purworejo   | 88.942                    | 12.014          | 12.202              | 2.850   | 61.876   |
| 21 | Kab. Rembang     | 73.932                    | 15.568          | 21.051              | 2.679   | 35.634   |
| 22 | Kab. Semarang    | 133.199                   | 39.433          | 66.260              | 3.568   | 23.937   |
| 23 | Kab. Sragen      | 94.519                    | 20.594          | 17.179              | 7.080   | 49.665   |
| 24 | Kab. Tegal       | 90.133                    | 21.861          | 11.995              | 4.471   | 51.806   |
| 25 | Kab. Temanggung  | 62.343                    | 11.213          | 37.984              | 6.683   | 7.464  |
| 26 | Kab. Wonogiri    | 77.142                    | 10.867          | 14.587              | 5.233   | 46.455   |
| 27 | Kab. Wonosobo    | 67.399                    | 8.823           | 13.017              | 4.967   | 40.592   |
| 28 | Kota Magelang    | 63.558                    | 9.464           | 5.282               | 3.113   | 45.699   |
| 29 | Kota Pekalongan  | 63.345                    | 19.912          | 14.938              | 2.199   | 26.295   |
| 30 | Kota Salatiga    | 60.611                    | 15.900          | 7.559               | 2.964   | 34.188   |
| 31 | Kota Semarang    | 521.538                   | 360.084         | 84.487              | 5.982   | 70.985   |
| 32 | Kota Surakarta   | 181.097                   | 118.816         | 47.671              | 4.465   | 10.144   |
| 33 | Kota Tegal       | 117.244                   | 20.891          | 14.112              | 1.930   | 80.311   |

# LAMPIRAN III

Tabel PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2008-2011

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**  
**KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2008-2011**

| <b>No</b> | <b>Kabupaten/kota</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Kabupaten Banjarnegara | 2.619.990   | 2.753.936   | 2.888.524   | 3.030.542   |
| 2         | Kabupaten Banyumas     | 4.171.469   | 4.400.542   | 4.654.634   | 4.927.351   |
| 3         | Kabupaten Batang       | 2.169.855   | 2.250.617   | 2.362.482   | 2.486.766   |
| 4         | Kabupaten Blora        | 1.913.763   | 2.010.909   | 2.115.370   | 2.170.195   |
| 5         | Kabupaten Boyolali     | 3.899.373   | 4.100.520   | 4.248.048   | 4.472.217   |
| 6         | Kabupaten Brebes       | 4.998.528   | 5.247.897   | 5.507.403   | 5.780.878   |
| 7         | Kabupaten Cilacap      | 11.689.093  | 12.302.860  | 12.998.129  | 13.749.105  |
| 8         | Kabupaten Demak        | 2.787.534   | 2.901.152   | 3.020.821   | 3.156.126   |
| 9         | Kabupaten Grobogan     | 2.948.794   | 3.097.093   | 3.153.399   | 3.370.344   |
| 10        | Kabupaten Jepara       | 3.889.989   | 4.085.435   | 4.270.257   | 4.504.552   |
| 11        | Kabupaten Kebumen      | 2.721.254   | 2.828.395   | 2.945.829   | 3.089.588   |
| 12        | Kabupaten Kendal       | 4.822.465   | 5.090.287   | 5.394.079   | 5.717.410   |
| 13        | Kabupaten Klaten       | 4.567.201   | 4.761.019   | 4.843.247   | 4.938.051   |
| 14        | Kabupaten Kudus        | 11.683.820  | 12.144.952  | 12.651.059  | 13.183.607  |
| 15        | Kabupaten Magelang     | 3.761.389   | 3.938.765   | 4.116.390   | 4.292.354   |
| 16        | Kabupaten Pati         | 4.162.082   | 4.357.144   | 4.579.853   | 4.828.723   |
| 17        | Kabupaten Pekalongan   | 2.970.215   | 3.098.071   | 3.230.351   | 3.384.388   |
| 18        | Kabupaten Pemasang     | 3.142.809   | 3.293.056   | 3.455.713   | 3.622.636   |
| 19        | Kabupaten Purbalingga  | 2.257.393   | 2.390.245   | 2.525.873   | 2.679.134   |
| 20        | Kabupaten Purworejo    | 2.737.087   | 2.872.724   | 3.016.598   | 3.168.113   |

| <b>No</b> | <b>KABUPATEN/KOTA</b> | <b>2008</b>        | <b>2009</b>        | <b>2010</b>        | <b>2011</b>        |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21        | Kabupaten Rembang     | 2.093.413          | 2.186.736          | 2.283.966          | 2.384.459          |
| 22        | Kabupaten Semarang    | 5.079.004          | 5.300.723          | 5.560.552          | 5.877.191          |
| 23        | Kabupaten Sragen      | 2.729.450          | 2.893.427          | 3.069.751          | 3.270.053          |
| 24        | Kabupaten Tegal       | 3.286.263          | 3.460.132          | 3.627.198          | 3.801.779          |
| 25        | Kabupaten Temanggung  | 2.219.156          | 2.309.842          | 2.409.386          | 2.521.439          |
| 26        | Kabupaten Wonogiri    | 2.770.436          | 2.901.577          | 3.071.964          | 3.134.182          |
| 27        | Kabupaten Wonosobo    | 1.741.148          | 1.811.093          | 1.888.808          | 1.974.114          |
| 28        | Kota Magelang         | 993.835            | 1.044.650          | 1.108.604          | 1.169.343          |
| 29        | Kota Pekalongan       | 1.887.854          | 1.978.082          | 2.087.114          | 2.200.828          |
| 30        | Kota Salatiga         | 832.155            | 869.453            | 913.020            | 963.457            |
| 31        | Kota Semarang         | 19.156.814         | 20.180.578         | 21.365.818         | 22.763.136         |
| 32        | Kota Surakarta        | 4.549.343          | 4.817.878          | 5.103.886          | 5.411.912          |
| 33        | Kota Tegal            | 1.166.588          | 1.225.102          | 1.281.528          | 1.340.228          |
|           |                       | <b>141.861.004</b> | <b>148.834.062</b> | <b>156.180.352</b> | <b>164.322.954</b> |

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH

TAHUN 2008-2011

| No | KABUPATEN/KOTA         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|------------------------|------|------|------|------|
| 1  | Kabupaten Banjarnegara | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2  | Kabupaten Banyumas     | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 3  | Kabupaten Batang       | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 4  | Kabupaten Blora        | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 5  | Kabupaten Boyolali     | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 6  | Kabupaten Brebes       | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 7  | Kabupaten Cilacap      | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 8  | Kabupaten Demak        | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 9  | Kabupaten Grobogan     | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| 10 | Kabupaten Jepara       | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 11 | Kabupaten Kebumen      | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 12 | Kabupaten Kendal       | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 13 | Kabupaten Klaten       | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | Kabupaten Kudus        | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 15 | Kabupaten Magelang     | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 16 | Kabupaten Pati         | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 17 | Kabupaten Pekalongan   | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 18 | Kabupaten Pemasang     | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 19 | Kabupaten Purbalingga  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 20 | Kabupaten Purworejo    | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 21 | Kabupaten Rembang      | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

| <b>No</b> | <b>KABUPATEN/KOTA</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22        | Kabupaten Semarang    | 0.04        | 0.04        | 0.05        | 0.06        |
| 23        | Kabupaten Sragen      | 0.06        | 0.06        | 0.06        | 0.07        |
| 24        | Kabupaten Tegal       | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        |
| 25        | Kabupaten Temanggung  | 0.04        | 0.04        | 0.04        | 0.05        |
| 26        | Kabupaten Wonogiri    | 0.04        | 0.05        | 0.06        | 0.02        |
| 27        | Kabupaten Wonosobo    | 0.04        | 0.04        | 0.04        | 0.05        |
| 28        | Kota Magelang         | 0.05        | 0.05        | 0.06        | 0.05        |
| 29        | Kota Pekalongan       | 0.04        | 0.05        | 0.06        | 0.05        |
| 30        | Kota Salatiga         | 0.05        | 0.04        | 0.05        | 0.06        |
| 31        | Kota Semarang         | 0.06        | 0.05        | 0.06        | 0.07        |
| 32        | Kota Surakarta        | 0.06        | 0.06        | 0.06        | 0.06        |
| 33        | Kota Tegal            | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        |

# LAMPIRAN IV

Data Belanja Daerah

Tahun 2008-2011

Data Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah

Tahun 2008

| No | Kabupaten dan Kota | Total Belanja | Belanja Daerah  |               |                 |               |                        |                         |               |                       |
|----|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                    |               | Belanja Operasi |               |                 |               |                        |                         | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|    |                    |               | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Belanja Subsidi | Belanja Hibah | Belanja Bantuan sosial | Belanja Barang dan Jasa |               |                       |
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 923.244       | 383.771         | -             | -               | 1.143         | 21.160                 | 87.883                  | 138.287       | 291                   |
| 2  | Kab. Banyumas      | 973.932       | 593.564         | -             | -               | 8.638         | 110.169                | 105.354                 | 154.241       | 1.966                 |
| 3  | Kab. Batang        | 645.625       | 281.748         | 160           | 2.250           | 5.560         | 3.913                  | 73.010                  | 119.144       | -                     |
| 4  | Kab. Blora         | 811.261       | 421.855         | 69            | -               | 3.947         | 22.563                 | 127.439                 | 141.457       | 25                    |
| 5  | Kab. Boyolali      | 776.741       | 462.796         | 43            | -               | 2.381         | 34.012                 | 110.019                 | 124.533       | -                     |
| 6  | Kab. Brebes        | 1.113.009     | 546.615         | 140           | -               | 2.023         | 89.658                 | 134.554                 | 195.182       | 4.977                 |
| 7  | Kab. Cilacap       | 1.117.356     | 587.540         | 70            | -               | 13.562        | 38.642                 | 127.226                 | 277.402       | 2.984                 |
| 8  | Kab. Demak         | 954.267       | 337.711         | -             | -               | 15            | 67.469                 | 107.897                 | 112.694       | 313.496               |
| 9  | Kab. Grobogan      | 1.469.956     | 447.885         | 641           | -               | 12.489        | 22.519                 | 138.009                 | 183.054       | 25                    |
| 10 | Kab. Jepara        | 1.542.549     | 389.704         | -             | 75              | 13.600        | 46.002                 | 111.873                 | 156.370       | 750                   |
| 11 | Kab. Kebumen       | 942.084       | 525.592         | 83            | -               | -             | 89.008                 | 84.443                  | 160.041       | -                     |
| 12 | Kab. Kendal        | 931.153       | 401.380         | 175           | -               | 5.272         | 69.911                 | 162.999                 | 116.591       | -                     |
| 13 | Kab. Klaten        | 1.925.505     | 620.686         | -             | -               | 357.000       | 51.393                 | 106.548                 | 144.478       | 645                   |
| 14 | Kab. Kudus         | 1.574.551     | 347.352         | 111           | 2               | 24.441        | 12.781                 | 133.661                 | 165.756       | 777.560               |

| No | Kabupaten dan Kota | Total Belanja | Belanja Daerah  |               |                 |               |                        |                         |               |                       |
|----|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                    |               | Belanja Operasi |               |                 |               |                        |                         | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|    |                    |               | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Belanja Subsidi | Belanja Hibah | Belanja Bantuan sosial | Belanja Barang dan Jasa |               |                       |
| 15 | Kab. Magelang      | 1.815.664     | 500.066         | 115           | 25              | 21.690        | 71.087                 | 138.011                 | 121.810       | 823                   |
| 16 | Kab. Pati          | 899.529       | 509.081         |               |                 | 11.297        | 46.430                 | 162.109                 | 162.415       | 8.197                 |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 833.183       | 371.288         | 192           | -               | -             | 80.597                 | 89.508                  | 96.601        | 3.189                 |
| 18 | Kab. Pemasang      | 1.158.075     | 410.660         | 497           | -               | 3.218         | 14.442                 | 94.782                  | 135.100       | 2.873                 |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 1.181.213     | 337.128         | 62            | 351             | 1.097         | 16.691                 | 106.910                 | 180.387       | 126                   |
| 20 | Kab. Purworejo     | 1.138.276     | 442.734         | 108           | -               | 24.848        | 36.118                 | 80.961                  | 106.615       | 339                   |
| 21 | Kab. Rembang       | 1.074.038     | 323.905         | 482           | -               | 3.391         | 62.184                 | 75.473                  | 123.251       | 3.834                 |
| 22 | Kab. Semarang      | 1.100.341     | 442.084         | 20            | 14              | 20.087        | 8.650                  | 123.403                 | 164.117       | 308                   |
| 23 | Kab. Sragen        | 1.342.811     | 455.481         | -             | -               | 4.137         | 21.887                 | 90.752                  | 170.554       | 600                   |
| 24 | Kab. Tegal         | 967.076       | 481.197         | 110           | 13.130          | 32.745        | 45.932                 | 92.188                  | 191.884       | -                     |
| 25 | Kab. Temanggung    | 667.417       | 309.926         | 3             |                 | 17.715        | 31.391                 | 60.156                  | 119.138       | 126.091               |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 794.583       | 474.382         |               | 43              | 7.511         | 17.391                 | 104.732                 | 144.349       | 3.218                 |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 1.134.752     | 309.693         | -             | -               | 9.962         | 2.251                  | 67.896                  | 160.950       | 584                   |
| 28 | Kota Magelang      | 361.115       | 176.031         | -             | -               | 4.887         | 3.976                  | 99.216                  | 72.452        | 4.553                 |
| 29 | Kota Pekalongan    | 412.129       | 173.138         | -             | -               | 9.761         | 15.824                 | 94.257                  | 104.149       | 15                    |
| 30 | Kota Salatiga      | 427.335       | 181.688         | -             | -               | -             | 10.652                 | 49.514                  | 126.481       | 59                    |
| 31 | Kota Semarang      | 1.325.301     | 713.841         | 1.610         | -               | 8.597         | 91.132                 | 355.055                 | 155.066       | -                     |
| 32 | Kota Surakarta     | 760.080       | 415.181         | 1.826         | -               | 17.832        | 48.027                 | 113.599                 | 163.615       | -                     |

| No | Kabupaten dan Kota | Total Belanja | Belanja Daerah  |               |                 |               |                        |                         |               |                       |
|----|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                    |               | Belanja Operasi |               |                 |               |                        |                         | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|    |                    |               | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Belanja Subsidi | Belanja Hibah | Belanja Bantuan sosial | Belanja Barang dan Jasa |               |                       |
| 33 | Kota Tegal         | 566.986       | 208.682         | 174           | -               | 6.661         | 2.578                  | 80.955                  | 94.110        | -                     |

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah

Data Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2009

| No | Kabupaten dan Kota | Total Belanja | Belanja Daerah  |               |                 |               |                        |                         |               |                       |
|----|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                    |               | Belanja Operasi |               |                 |               |                        |                         | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|    |                    |               | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Belanja Subsidi | Belanja Hibah | Belanja Bantuan sosial | Belanja Barang dan Jasa |               |                       |
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 1.552.518     | 449.176         | -             | -               | 42.738        | 80.926                 | 84.278                  | 77.400        | 818                   |
| 2  | Kab. Banyumas      | 976.231       | 633.260         | -             | -               | 21.605        | 43.357                 | 131.565                 | 144.954       | 1.490                 |
| 3  | Kab. Batang        | 954.561       | 349.587         | 140           | 3.997           | 6.397         | 7.209                  | 73.126                  | 97.245        | 277                   |
| 4  | Kab. Blora         | 1.838.596     | 462.694         | 61            | -               | 60.728        | 100.651                | 109.621                 | 69.902        | 974                   |
| 5  | Kab. Boyolali      | 797.209       | 514.595         | 37.795        | -               | 51.189        | 26.731                 | 75.631                  | 86.597        | 4.671                 |
| 6  | Kab. Brebes        | 1.005.359     | 582.245         | 79            | -               | 1.684         | 87.616                 | 122.775                 | 130.717       | 1.322                 |
| 7  | Kab. Cilacap       | 1.638.041     | 635.175         | 59            | -               | 64.843        | 26.674                 | 139.746                 | 176.603       | 536                   |
| 8  | Kab. Demak         | 747.262       | 388.724         | -             | -               | 2.507         | 126.258                | 76.687                  | 153.086       | -                     |
| 9  | Kab. Grobogan      | 788.913       | 529.926         | 3.955         | -               | 22.434        | 15.624                 | 117.604                 | 97.472        | 1.898                 |
| 10 | Kab. Jepara        | 758.103       | 441.415         | -             | 1.933           | 54.623        | 41.753                 | 127.631                 | 90.748        | -                     |
| 11 | Kab. Kebumen       | 982.163       | 604.647         | 37            | -               | 2.485         | 93.886                 | 84.784                  | 159.361       | -                     |
| 12 | Kab. Kendal        | 869.573       | 403.545         | 151           | -               | 4.893         | 37.356                 | 161.888                 | 110.891       | -                     |
| 13 | Kab. Klaten        | 1.644.107     | 679.199         | -             | -               | 47.257        | 38.198                 | 84.987                  | 68.466        | 726                   |
| 14 | Kab. Kudus         | 891.885       | 358.597         | 95            | -               | 19.455        | 20.593                 | 145.864                 | 252.376       | -                     |
| 15 | Kab. Magelang      | 2.367.791     | 549.290         | -             | 633             | 15.630        | 79.710                 | 96.063                  | 108.098       | 886                   |
| 16 | Kab. Pati          | 956.569       | 547.185         | -             | -               | 15.955        | 56.663                 | 171.862                 | 161.129       | 3.775                 |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 796.858       | 399.068         | 168           | -               | -             | 40.722                 | 85.234                  | 102.433       | 1.401                 |

|    |                  |           |         |       |     |        |        |         |         |       |
|----|------------------|-----------|---------|-------|-----|--------|--------|---------|---------|-------|
| 18 | Kab. Pemalang    | 1.454.609 | 533.863 | 426   | -   | 8.040  | 59.967 | 113.207 | 126.532 | 187   |
| 19 | Kab. Purbalingga | 1.157.607 | 394.388 | 55    | 425 | 4.142  | 13.497 | 149.765 | 114.668 | 1.147 |
| 20 | Kab. Purworejo   | 960.838   | 503.253 | 95    | -   | 23.635 | 40.250 | 80.680  | 110.02  | 108   |
| 21 | Kab. Rembang     | 627.352   | 354.548 | 1.380 | -   | 40.328 | 61.192 | 73.010  | 56.894  | 40    |
| 22 | Kab. Semarang    | 1.608.025 | 416.636 | 15    | 57  | 62.128 | 8.086  | 136.467 | 91.708  | 821   |
| 23 | Kab. Sragen      | 807.029   | 530.511 | -     | -   | 25.279 | 49.876 | 99.126  | 102.237 | -     |
| 24 | Kab. Tegal       | 1.801.032 | 528.978 | 95    | -   | 860    | 75.889 | 97.805  | 142.099 | 1.261 |
| 25 | Kab. Temanggung  | 1.460.877 | 339.675 | -     | -   | 36.944 | 10.889 | 58.263  | 95.106  | 920   |
| 26 | Kab. Wonogiri    | 1.019.294 | 583.891 | -     | -   | 55.461 | 48.425 | 107.973 | 84.544  | 139   |
| 27 | Kab. Wonosobo    | 1.470.578 | 353.144 | -     | -   | 11.540 | 52.883 | 78.031  | 195.98  | 779   |
| 28 | Kota Magelang    | 873.398   | 197.634 | -     | -   | 17.741 | 5.552  | 72.070  | 93.401  | 487   |
| 29 | Kota Pekalongan  | 507.255   | 168.914 | -     | -   | 18.506 | 4.645  | 79.934  | 78.256  | 157   |
| 30 | Kota Salatiga    | 565.522   | 201.556 | -     | -   | 7.890  | 12.005 | 60.576  | 150.495 | 133   |
| 31 | Kota Semarang    | 2.104.900 | 804.747 | 600   | -   | 56.844 | 84.377 | 342.038 | 216.894 | -     |
| 32 | Kota Surakarta   | 1.557.995 | 410.530 | 855   | -   | 80.073 | 15.018 | 115.493 | 81.881  | -     |
| 33 | Kota Tegal       | 822.312   | 183.576 | 316   | -   | 6.817  | 13.556 | 104.752 | 122.611 | 75    |

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah

Data Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah

Tahun 2010

| No | Kabupaten dan Kota | Total Belanja | Belanja Daerah  |                         |               |                 |               |                        |               |                       |
|----|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                    |               | Belanja Operasi |                         |               |                 |               |                        | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|    |                    |               | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Bunga | Belanja Subsidi | Belanja Hibah | Belanja Bantuan sosial |               |                       |
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 1.350.144     | 540.785         | 95.963                  | -             | -               | 2.713         | 6.468                  | 155.215       | 549                   |
| 2  | Kab. Banyumas      | 1.134.780     | 857.079         | 127.408                 | -             | -               | 6.936         | 38.406                 | 103.063       | 1.888                 |
| 3  | Kab. Batang        | 690.607       | 447.531         | 76.609                  | 121           | -               | 13.424        | 6.564                  | 25.479        | -                     |
| 4  | Kab. Blora         | 1.082.647     | 541.382         | 95.021                  | 56            | -               | 30.504        | 27.393                 | 53.347        | 279                   |
| 5  | Kab. Boyolali      | 912.027       | 630.913         | 86.030                  | 33            | -               | 29.484        | 30.016                 | 100.101       | 2.483                 |
| 6  | Kab. Brebes        | 1.076.703     | 701.381         | 165.885                 | -             | -               | 17.722        | 58.146                 | 131.399       | 2.170                 |
| 7  | Kab Cilacap        | 1.663.812     | 845.173         | 156.198                 | 49            | -               | 48.571        | 22.958                 | 163.912       | 378                   |
| 8  | Kab. Demak         | 1.348.770     | 441.946         | 155.875                 | -             | -               | 10.503        | 89.553                 | 126.893       | 524                   |
| 9  | Kab. Grobogan      | 1.513.687     | 590.339         | 130.718                 | 2.261         | -               | 31.425        | 28.256                 | 91.688        | 639                   |
| 10 | Kab. Jepara        | 852.319       | 515.343         | 157.697                 |               | 4.894           | 13.432        | 41.187                 | 119.766       | -                     |
| 11 | Kab. Kebumen       | 970.976       | 718.687         | 79.364                  | -             | -               | 21.252        | 32.901                 | 118.772       | -                     |
| 12 | Kab. Kendal        | 1.414.721     | 533.312         | 148.820                 | 130           | -               | 15.022        | 39.296                 | 134.271       | 414                   |
| 13 | Kab. Klaten        | 1.545.507     | 819.230         | 89.588                  | 1.001         | -               | 17.293        | 39.253                 | 40.142        | 539                   |
| 14 | Kab. Kudus         | 1.863.223     | 492.670         | 146.366                 | 85            | -               | 43.293        | 33.801                 | 165.093       | 897                   |
| 15 | Kab. Magelang      | 940.829       | 656.219         | 118.038                 | -             | 32              | 22.335        | 12.869                 | 97.926        | 1.442                 |

| No | Kabupaten dan Kota | Total Belanja | Belanja Daerah      |         |       |                 |               |                        |               |                       |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------|-------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                    |               | Belanja Operasional |         |       |                 |               |                        | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|    |                    |               | Belanja Pegawai     |         |       | Belanja Subsidi | Belanja Hibah | Belanja Bantuan sosial |               |                       |
| 16 | Kab Pati           | 939.623       | 674.637             | 170.645 | -     | -               | 10.831        | 13.406                 | 68.355        | 1.749                 |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 1.615.273     | 523.048             | 86.347  | 145   | -               | 5.084         | 36.503                 | 73.291        | 746                   |
| 18 | Kab. Pemalang      | 2.171.947     | 638.377             | 117.667 | 327   | -               | 23.981        | 21.748                 | 77.174        | 966                   |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 1.076.236     | 494.033             | 126.628 | 47    | 343             | 12.774        | 7.742                  | 43.188        | 1.871                 |
| 20 | Kab. Purworejo     | 1.081.820     | 596.853             | 85.975  | 82    | -               | 31.696        | 12.227                 | 62.069        | 211                   |
| 21 | Kab. Rembang       | 1.191.070     | 437.784             | 77.914  | 41    | -               | 15.387        | 33.855                 | 92.130        | 493                   |
| 22 | Kab. Semarang      | 1.740.781     | 553.452             | 136.041 | 12    | 101             | 33.720        | 8.529                  | 76.039        | 820                   |
| 23 | Kab. Sragen        | 874.590       | 636.708             | 115.895 | -     | -               | 4.077         | 31.546                 | 86.364        | -                     |
| 24 | Kab. Tegal         | 997.742       | 626.562             | 122.722 | 81    |                 | 1.930         | 32.994                 | 131.061       | 1.473                 |
| 25 | Kab. Temanggung    | 618.329       | 441.554             | 72.219  | -     | -               | 39.298        | 19.022                 | 44.834        | 1.402                 |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 1.623.423     | 721.843             | 88.196  | -     | -               | 21.936        | 687.000                | 103.312       | 1.136                 |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 2.439.988     | 421.064             | 130.079 | 1.365 | -               | 36.319        | 828.000                | 39.161        | 984                   |
| 28 | Kota Magelang      | 410.186       | 265.654             | 79.141  | -     | -               | 9.867         | 6.572                  | 47.661        | 1.291                 |
| 29 | Kota Pekalongan    | 732.241       | 232.187             | 93.957  | -     | -               | 22.565        | 2.973                  | 56.559        | 324                   |
| 30 | Kota Salatiga      | 417.498       | 241.205             | 69.514  | -     | -               | 8.954         | 8.182                  | 89.643        | -                     |
| 31 | Kota Semarang      | 1.731.936     | 977.070             | 399.035 | 1.080 | -               | 32.681        | 105.581                | 216.489       | -                     |
| 32 | Kota Surakarta     | 1.637.346     | 547.662             | 119.355 | 2.327 | -               | 59.424        | 5.816                  | 79.762        | 823                   |
| 33 | Kota Tegal         | 794.503       | 258.565             | 117.375 | 272   | -               | 6.563         | 24.880                 | 66.120        | 49                    |

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah

Data Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah

Tahun 2011

| No | Kabupaten dan Kota | Total Belanja | Belanja Daerah  |                         |               |                 |               |                        |               |                       |
|----|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                    |               | Belanja Operasi |                         |               |                 |               |                        | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|    |                    |               | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Bunga | Belanja Subsidi | Belanja Hibah | Belanja Bantuan sosial |               |                       |
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 991.169       | 592.420         | 188.011                 | -             | -               | 16.640        | 30.282                 | 160.076       | 3.740                 |
| 2  | Kab. Banyumas      | 1.368.021     | 915.313         | 221.814                 | -             | -               | 29.327        | 27.102                 | 169.316       | 5.149                 |
| 3  | Kab. Batang        | 849.618       | 494.862         | 129.309                 | 102           | -               | 25.389        | 8.767                  | 88.042        | 1.249                 |
| 4  | Kab. Blora         | 927.787       | 611.532         | 121.746                 | 44            | -               | 9.591         | 33.137                 | 105.829       | 1.952                 |
| 5  | Kab. Boyolali      | 1.085.886     | 725.208         | 145.199                 | 27            | -               | 16.932        | 33.110                 | 138.437       | -                     |
| 6  | Kab. Brebes        | 1.275.590     | 795.428         | 241.594                 | -             | -               | 26.561        | 64.565                 | 142.729       | 4.713                 |
| 7  | Kab. Cilacap       | 1.433.397     | 854.485         | 240.110                 | 39            | -               | 66.170        | 27.379                 | 203.565       | 2.688                 |
| 8  | Kab. Demak         | 1.052.912     | 565.161         | 157.900                 | -             | -               | 19.617        | 74.204                 | 234.922       | 1.108                 |
| 9  | Kab. Grobogan      | 1.399.246     | 725.218         | 198.003                 | 256           | -               | 26.066        | 23.066                 | 161.322       | 9.571                 |
| 10 | Kab. Jepara        | 1.707.137     | 580.319         | 217.129                 | -             | 3.062           | 30.446        | 51.253                 | 212.928       | 612                   |
| 11 | Kab. Kebumen       | 1.174.856     | 811.314         | 133.365                 | -             | -               | 9.106         | 33.933                 | 187.138       | -                     |
| 12 | Kab. Kendal        | 1.948.163     | 609.211         | 245.654                 | 110           | -               | 10.356        | 15.952                 | 199.990       | 757                   |
| 13 | Kab. Klaten        | 1.298.991     | 939.789         | 159.317                 | 27            | -               | 9.388         | 31.943                 | 130.546       | 1.008                 |
| 14 | Kab. Kudus         | 997.419       | 534.190         | 200.193                 | 71            | -               | 37.801        | 27.329                 | 125.457       | 1.449                 |
| 15 | Kab. Magelang      | 992.357       | 709.047         | 156.855                 | -             | -               | 26.333        | 13.442                 | 84.900        | 1.780                 |

| No | Kabupaten dan Kota | Total Belanja | Belanja Daerah  |               |                 |                 |               |         |                        |               |                       |
|----|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                    |               | Belanja Operasi |               |                 |                 |               |         | Belanja Bantuan sosial | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
|    |                    |               | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Belanja Subsidi | Belanja Subsidi | Belanja Hibah |         |                        |               |                       |
| 16 | Kab. Pati          | 1.144.270     | 764.970         | 223.996       | -               | -               | 40.995        | 22.541  | 89.665                 | 2.103         |                       |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 1.016.897     | 607.357         | 148.223       | -               | 122             | 17.776        | 23.112  | 97.246                 | 1.183         |                       |
| 18 | Kab. Pemalang      | 1.293.247     | 699.880         | 189.783       | 224             | -               | 19.518        | 30.513  | 128.206                | 1.347         |                       |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 1.221.604     | 590.543         | 227.530       | 40              | 279             | 4.242         | 12.497  | 66.386                 | 1.406         |                       |
| 20 | Kab. Purworejo     | 1.634.310     | 693.555         | 125.687       | 69              | -               | 20.811        | 11.392  | 87.865                 | 626           |                       |
| 21 | Kab. Rembang       | 1.559.732     | 513.159         | 94.367        | 37              | -               | 8.755         | 35.458  | 187.993                | 683           |                       |
| 22 | Kab. Semarang      | 2.020.602     | 576.026         | 188.515       | 10              | 108             | 25.182        | 13.340  | 160.539                | 939           |                       |
| 23 | Kab. Sragen        | 1.004.197     | 754.187         | 139.933       | -               | -               | 17.087        | 22.153  | 70.837                 | -             |                       |
| 24 | Kab. Tegal         | 1.142.253     | 727.767         | 163.338       | 67              | -               | 7.276         | 28.790  | 145.856                | 2.226         |                       |
| 25 | Kab. Temanggung    | 1.734.857     | 474.667         | 91.743        | -               | -               | 60.528        | 20.885  | 93.034                 | 994           |                       |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 1.120.193     | 794.344         | 134.145       | -               | 159             | 16.375        | 1.805   | 11.320                 | 3.204         |                       |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 1.715.006     | 481.803         | 214.311       | -               | -               | 25.126        | 2.005   | 119.761                | 872           |                       |
| 28 | Kota Magelang      | 1.155.268     | 282.166         | 92.345        | -               | -               | 5.961         | 6.769   | 81.027                 | 687           |                       |
| 29 | Kota Pekalongan    | 807.300       | 268.421         | 117.940       | -               | -               | 17.323        | 3.272   | 82.344                 | 318           |                       |
| 30 | Kota Salatiga      | 457.208       | 278.030         | 83.537        | -               | -               | 10.293        | 6.826   | 77.409                 | 1.113         |                       |
| 31 | Kota Semarang      | 3.263.491     | 986.366         | 461.754       | 764             | -               | 50.114        | 104.553 | 305.704                | 591           |                       |
| 32 | Kota Surakarta     | 1.226.402     | 616.553         | 151.271       | 1.865           | -               | 77.688        | 6.582   | 128.443                | 244           |                       |
| 33 | Kota Tegal         | 794.245       | 299.289         | 139.953       | 223             | -               | 10.246        | 27.794  | 93.963                 | -             |                       |

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah

# LAMPIRAN V

Tabel Perhitungan Natural Logaritma,  
Pendapatan Asli Kabupaten dan kota, Dana  
Alokasi Umum, dan Belanja Modal

Tahun 2008-2011

Tabel Perhitungan Natural Logaritma PAD, DAU dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2008

| NO | Kabupaten/<br>Kota | PAD     | Natural<br>LOG | DAU     | Natural<br>LOG | BM      | Natural<br>LOG |
|----|--------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 46.521  | 24.56          | 488.708 | 26.92          | 138.287 | 25.65          |
| 2  | Kab. Banyumas      | 107.426 | 25.40          | 702.152 | 27.28          | 154.241 | 25.76          |
| 3  | Kab. Batang        | 41.193  | 24.44          | 401.575 | 26.72          | 119.144 | 25.50          |
| 4  | Kab. Blora         | 48.954  | 24.61          | 478.260 | 26.89          | 141.457 | 25.67          |
| 5  | Kab. Boyolali      | 63.733  | 24.84          | 582.512 | 27.09          | 124.533 | 25.55          |
| 6  | Kab. Brebes        | 72.074  | 25.00          | 716.427 | 27.30          | 195.182 | 26.00          |
| 7  | Kab. Cilacap       | 102.780 | 25.35          | 773.079 | 27.37          | 277.402 | 26.35          |
| 8  | Kab. Demak         | 43.821  | 24.50          | 483.239 | 26.90          | 112.694 | 25.45          |
| 9  | Kab. Grobogan      | 59.925  | 24.81          | 615.030 | 27.14          | 183.054 | 25.93          |
| 10 | Kab. Jepara        | 71.268  | 25.00          | 505.641 | 26.95          | 156.370 | 25.78          |
| 11 | Kab. Kebumen       | 58.599  | 24.79          | 616.395 | 27.14          | 160.041 | 25.80          |
| 12 | Kab. Kendal        | 71.685  | 25.00          | 490.895 | 26.92          | 116.591 | 25.48          |
| 13 | Kab. Klaten        | 49.550  | 24.63          | 744.677 | 27.34          | 144.478 | 25.70          |
| 14 | Kab. Kudus         | 71.520  | 25.00          | 460.541 | 26.86          | 165.756 | 25.83          |
| 15 | Kab. Magelang      | 78.120  | 25.08          | 588.002 | 27.10          | 121.810 | 25.53          |
| 16 | Kab. Pati          | 80.495  | 25.11          | 603.264 | 27.13          | 162.415 | 25.81          |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 55.279  | 24.73          | 465.324 | 26.87          | 96.601  | 25.29          |
| 18 | Kab. Pemasang      | 66.747  | 24.92          | 577.865 | 27.08          | 135.100 | 25.63          |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 63.799  | 24.88          | 458.205 | 26.85          | 180.387 | 25.92          |
| 20 | Kab. Purworejo     | 51.175  | 24.65          | 515.796 | 26.97          | 106.615 | 25.39          |
| 21 | Kab. Rembang       | 51.126  | 24.65          | 398.411 | 26.71          | 123.251 | 25.54          |
| 22 | Kab. Semarang      | 82.943  | 25.14          | 491.166 | 26.92          | 164.117 | 25.82          |
| 23 | Kab. Sragen        | 65.803  | 24.91          | 551.266 | 27.04          | 170.554 | 25.86          |
| 24 | Kab. Tegal         | 59.155  | 24.80          | 606.452 | 27.13          | 191.884 | 25.98          |
| 25 | Kab. Temanggung    | 37.924  | 24.36          | 421.056 | 26.77          | 119.138 | 25.50          |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 54.129  | 24.71          | 598.933 | 27.12          | 144.349 | 25.70          |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 38.158  | 24.37          | 427.667 | 26.78          | 160.950 | 25.80          |

| <b>No</b> | <b>Kabupaten dan kota</b> | <b>PAD</b> | <b>Natural LOG</b> | <b>DAU</b> | <b>Natural LOG</b> | <b>BM</b> | <b>Natural LOG</b> |
|-----------|---------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 28        | Kota Magelang             | 40.506     | 24.42              | 256.525    | 26.27              | 72.452    | 25.00              |
| 29        | Kota Pekalongan           | 30.096     | 24.13              | 264.052    | 26.30              | 104.149   | 25,37              |
| 30        | Kota Salatiga             | 45.147     | 24.53              | 225.385    | 26.14              | 126.481   | 25.56              |
| 31        | Kota Semarang             | 267.914    | 26.31              | 634.864    | 27.18              | 155.066   | 25.77              |
| 32        | Kota Surakarta            | 102.990    | 25.35              | 420.912    | 26.77              | 163.615   | 25.82              |
| 33        | Kota Tegal                | 69.567     | 24.97              | 236.194    | 26.19              | 94.110    | 25.27              |

Tabel Perhitungan Natural Logaritma PAD, DAU dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2009

| No | Kabupaten dan Kota | PAD     | Natural LOG | DAU     | Natural LOG | BM      | Natural LOG |
|----|--------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 60.637  | 24.83       | 38.698  | 24.38       | 77.400  | 25.07       |
| 2  | Kab. Banyumas      | 120.520 | 25.52       | 735.150 | 27.32       | 144.954 | 25.70       |
| 3  | Kab. Batang        | 44.644  | 24.52       | 416.406 | 26.75       | 97.245  | 25.30       |
| 4  | Kab. Blora         | 49.696  | 24.63       | 72.047  | 25.00       | 69.902  | 24.97       |
| 5  | Kab. Boyolali      | 70.005  | 24.97       | 586.021 | 27.10       | 86.597  | 25.18       |
| 6  | Kab. Brebes        | 80.275  | 25.11       | 50.403  | 24.64       | 130.717 | 25.60       |
| 7  | Kab. Cilacap       | 120.746 | 25.51       | 782.144 | 27.39       | 176.603 | 25.90       |
| 8  | Kab. Demak         | 50.236  | 24.64       | 39.864  | 24.41       | 153.086 | 25.75       |
| 9  | Kab. Grobogan      | 77.080  | 25.07       | 52.672  | 24.69       | 97.472  | 25.30       |
| 10 | Kab. Jepara        | 71.920  | 25.00       | 47.779  | 24.59       | 90.748  | 25.23       |
| 11 | Kab. Kebumen       | 63.016  | 24.87       | 37.293  | 24.34       | 159.361 | 25.79       |
| 12 | Kab. Kendal        | 76.806  | 25.06       | 512.809 | 26.96       | 110.891 | 25.43       |
| 13 | Kab. Klaten        | 53.143  | 24.70       | 726.193 | 27.31       | 68.466  | 24.95       |
| 14 | Kab. Kudus         | 83.046  | 25.14       | 471.869 | 26.88       | 252.376 | 25.25       |
| 15 | Kab. Magelang      | 75.582  | 25.05       | 44.986  | 24.53       | 108.098 | 25.41       |
| 16 | Kab. Pati          | 90.668  | 25.23       | 55.088  | 24.73       | 161.129 | 25.80       |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 58.468  | 24.79       | 475.248 | 26.89       | 102.433 | 25.35       |
| 18 | Kab. Pemasang      | 81.819  | 25.13       | 40.793  | 24.43       | 126.532 | 25.56       |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 83.177  | 25.14       | 462.101 | 26.86       | 114.668 | 25.47       |
| 20 | Kab. Purworejo     | 60.814  | 24.83       | 35.089  | 24.28       | 110.020 | 25.42       |
| 21 | Kab. Rembang       | 56.888  | 24.76       | 36.162  | 24.31       | 56.894  | 24.76       |
| 22 | Kab. Semarang      | 90.390  | 25.28       | 508.705 | 26.96       | 91.708  | 25.24       |
| 23 | Kab. Sragen        | 72.681  | 25.01       | 35.698  | 24.30       | 102.237 | 25.25       |
| 24 | Kab. Temanggung    | 47.327  | 24.58       | 430.269 | 26.79       | 95.106  | 25.28       |
| 25 | Kab. Tegal         | 70.860  | 24.98       | 40.877  | 24.43       | 142.099 | 25.68       |
| 26 | Kab. Wonogiri      | 57.093  | 24.77       | 38.553  | 24.38       | 84.544  | 25.16       |
| 27 | Kab. Wonosobo      | 46.325  | 24.55       | 35.650  | 24.30       | 195.980 | 26.00       |
| 28 | Kota Magelang      | 47.705  | 24.59       | 256.728 | 26.27       | 93.401  | 25.26       |

| <b>No</b> | <b>Kabupaten dan kota</b> | <b>PAD</b> | <b>Natural LOG</b> | <b>DAU</b> | <b>Natural LOG</b> | <b>BM</b> | <b>Natural LOG</b> |
|-----------|---------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 29        | Kota Pekalongan           | 32.238     | 24.20              | 265.361    | 26.30              | 78.256    | 25.08              |
| 30        | Kota Salatiga             | 53.056     | 24.69              | 24.388     | 23.92              | 150.495   | 25.74              |
| 31        | Kota Semarang             | 306.112    | 26.45              | 256.042    | 26.27              | 216.894   | 26.10              |
| 32        | Kota Surakarta            | 101.972    | 25.35              | 435.471    | 26.80              | 81.881    | 25.13              |
| 33        | Kota Tegal                | 90.841     | 25.23              | 241.785    | 26.21              | 122.611   | 25.53              |

Tabel Perhitungan Natural Logaritma PAD, DAU dan Belanja Modal  
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2010

| No | Kabupaten dan Kota | PAD     | Natural LOG | Dana Alokasi Umum | Natural LOG | BM      | Natural LOG |
|----|--------------------|---------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 62.487  | 24.86       | 506.783           | 26.95       | 155.215 | 25.77       |
| 2  | Kab. Banyumas      | 164.892 | 25.83       | 720.191           | 27.30       | 103.063 | 25.36       |
| 3  | Kab. Batang        | 45.422  | 24.53       | 414.494           | 26.75       | 25.479  | 23.96       |
| 4  | Kab. Blora         | 47.088  | 24.57       | 487.917           | 26.91       | 53.347  | 24.70       |
| 5  | Kab. Boyolali      | 86.486  | 25.18       | 587.574           | 27.10       | 100.101 | 25.33       |
| 6  | Kab. Brebes        | 71.025  | 24.97       | 738.270           | 27.33       | 131.399 | 25.60       |
| 7  | Kab Cilacap        | 149.709 | 25.73       | 793.267           | 27.40       | 163.912 | 25.82       |
| 8  | Kab. Demak         | 56.756  | 24.76       | 493.497           | 26.92       | 126.893 | 25.57       |
| 9  | Kab. Grobogan      | 78.366  | 25.08       | 617.827           | 27.15       | 91.688  | 25.24       |
| 10 | Kab. Jepara        | 84.713  | 25.16       | 670.275           | 27.23       | 119.766 | 25.51       |
| 11 | Kab. Kebumen       | 58.742  | 24.80       | 642.798           | 27.19       | 118.772 | 25.50       |
| 12 | Kab. Kendal        | 86.235  | 25.18       | 520.677           | 26.98       | 134.271 | 25.63       |
| 13 | Kab. Klaten        | 54.886  | 24.73       | 726.234           | 27.31       | 40.142  | 24.42       |
| 14 | Kab. Kudus         | 94.033  | 25.27       | 463.013           | 26.86       | 165.093 | 25.83       |
| 15 | Kab. Magelang      | 76.058  | 25.05       | 604.522           | 27.13       | 97.926  | 25.31       |
| 16 | Kab Pati           | 112.527 | 25.45       | 620.577           | 27.15       | 68.355  | 24.95       |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 67.580  | 24.94       | 490.039           | 26.92       | 73.291  | 25.02       |
| 18 | Kab. Pemasang      | 76.441  | 25.06       | 619.896           | 27.15       | 77.174  | 25.07       |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 79.803  | 25.10       | 464.789           | 26.86       | 43.188  | 24.49       |
| 20 | Kab. Purworejo     | 69.609  | 24.97       | 528.061           | 26.99       | 62.069  | 24.85       |
| 21 | Kab. Rembang       | 65.699  | 24.91       | 411.435           | 26.74       | 92.130  | 25.25       |

| <b>No</b> | <b>Kabupaten dan kota</b> | <b>PAD</b> | <b>Natural LOG</b> | <b>DAU</b> | <b>Natural LOG</b> | <b>BM</b> | <b>Natural LOG</b> |
|-----------|---------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 22        | Kab. Semarang             | 98.831     | 25.32              | 508.915    | 26.95              | 76.039    | 25.05              |
| 23        | Kab. Sragen               | 79.627     | 25.10              | 561.675    | 27.05              | 86.364    | 25.18              |
| 24        | Kab. Tegal                | 73.063     | 25.01              | 640.042    | 27.18              | 131.061   | 25.60              |
| 25        | Kab. Temanggung           | 55.211     | 24.73              | 438.091    | 26.80              | 44.834    | 24.53              |
| 26        | Kab. Wonogiri             | 64.969     | 24.90              | 616.996    | 27.15              | 103.312   | 25.36              |
| 27        | Kab. Wonosobo             | 52.079     | 24.68              | 442.370    | 26.81              | 39.161    | 24.31              |
| 28        | Kota Magelang             | 59.548     | 24.81              | 260.113    | 26.28              | 47.661    | 24.59              |
| 29        | Kota Pekalongan           | 47.496     | 24.58              | 266.793    | 26.31              | 56.559    | 24.76              |
| 30        | Kota Salatiga             | 51.550     | 24.66              | 238.069    | 26.19              | 89.643    | 25.22              |
| 31        | Kota Semarang             | 327.992    | 26.52              | 640.186    | 27.18              | 216.489   | 26.10              |
| 32        | Kota Surakarta            | 113.946    | 25.46              | 499.448    | 26.94              | 79.762    | 25.10              |
| 33        | Kota Tegal                | 101.322    | 25.34              | 244.581    | 26.22              | 66.120    | 24.91              |

Tabel Perhitungan Natural Logaritma PAD, DAU dan Belanja Modal  
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2011

| No | Kabupaten dan kota | PAD     | Natural LOG | DAU     | Natural LOG | BM      | Natural LOG |
|----|--------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| 1  | Kab. Banjarnegara  | 71.107  | 24.99       | 562.288 | 27.05       | 160.076 | 25.80       |
| 2  | Kab. Banyumas      | 191.900 | 25.98       | 835.610 | 27.45       | 169.316 | 25.85       |
| 3  | Kab. Batang        | 60.155  | 24.82       | 472.131 | 26.88       | 88.042  | 25.20       |
| 4  | Kab. Blora         | 67.022  | 24.93       | 547.170 | 27.03       | 105.829 | 25.38       |
| 5  | Kab. Boyolali      | 96.738  | 25.29       | 641.483 | 27.19       | 138.437 | 25.65       |
| 6  | Kab. Brebes        | 78.276  | 25.08       | 800.183 | 27.41       | 142.729 | 25.68       |
| 7  | Kab. Cilacap       | 172.327 | 25.87       | 876.994 | 27.50       | 203.565 | 26.04       |
| 8  | Kab. Demak         | 74.559  | 25.03       | 544.460 | 27.02       | 234.922 | 26.18       |
| 9  | Kab. Grobogan      | 87.912  | 25.20       | 668.995 | 27.23       | 161.322 | 25.81       |
| 10 | Kab. Jepara        | 103.642 | 25.36       | 592.164 | 27.11       | 212.928 | 26.08       |
| 11 | Kab. Kebumen       | 73.513  | 25.02       | 731.981 | 27.32       | 187.138 | 25.95       |
| 12 | Kab. Kendal        | 93.290  | 25.26       | 569.224 | 27.07       | 199.990 | 26.02       |
| 13 | Kab. Klaten        | 72.291  | 25.00       | 793.293 | 27.40       | 130.546 | 25.59       |
| 14 | Kab. Kudus         | 108.459 | 25.41       | 488.820 | 26.91       | 125.457 | 25.55       |
| 15 | Kab. Magelang      | 90.463  | 25.23       | 668.922 | 27.23       | 84.900  | 25.16       |
| 16 | Kab. Pati          | 134.476 | 25.62       | 692.179 | 27.26       | 89.665  | 25.22       |
| 17 | Kab. Pekalongan    | 81.363  | 25.12       | 553.660 | 27.04       | 97.246  | 25.30       |
| 18 | Kab. Pemasang      | 79.678  | 25.10       | 672.430 | 27.23       | 128.206 | 25.28       |
| 19 | Kab. Purbalingga   | 94.946  | 25.28       | 521.932 | 26.98       | 66.386  | 24.92       |
| 20 | Kab. Purworejo     | 88.942  | 25.21       | 585.851 | 27.10       | 87.865  | 25.20       |
| 21 | Kab. Rembang       | 73.932  | 25.03       | 468.745 | 26.87       | 187.993 | 25.95       |
| 22 | Kab. Semarang      | 133.199 | 25.61       | 567.856 | 27.06       | 160.539 | 25.80       |

| <b>No</b> | <b>Kabupaten dan kota</b> | <b>PAD</b> | <b>Natural LOG</b> | <b>DAU</b> | <b>Natural LOG</b> | <b>BM</b> | <b>Natural LOG</b> |
|-----------|---------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 23        | Kab. Sragen               | 94.519     | 25.27              | 618.443    | 27.15              | 70.837    | 24.98              |
| 24        | Kab. Tegal                | 90.133     | 25.22              | 703.779    | 27.28              | 145.856   | 25.70              |
| 25        | Kab. Temanggung           | 62.343     | 24.85              | 482.938    | 26.90              | 93.034    | 25.26              |
| 26        | Kab. Wonogiri             | 77.142     | 25.07              | 682.033    | 27.25              | 111.320   | 25.43              |
| 27        | Kab. Wonosobo             | 67.399     | 24.93              | 485.766    | 26.91              | 119.761   | 25.51              |
| 28        | Kota Magelang             | 63.558     | 24.87              | 292.580    | 26.40              | 81.027    | 25.12              |
| 29        | Kota Pekalongan           | 63.345     | 24.87              | 293.530    | 26.40              | 82.344    | 25.13              |
| 30        | Kota Salatiga             | 60.611     | 24.83              | 262.653    | 26.29              | 77.409    | 25.07              |
| 31        | Kota Semarang             | 521.538    | 26.98              | 715.701    | 27.29              | 305.704   | 26.44              |
| 32        | Kota Surakarta            | 181.097    | 25.92              | 473.889    | 26.88              | 128.443   | 25.58              |
| 33        | Kota tegal                | 117.244    | 25.49              | 265.483    | 26.30              | 93.963    | 25.27              |

# LAMPIRAN VI

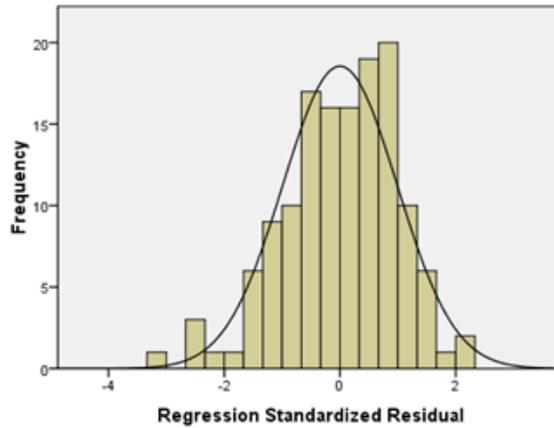
## Hasil Analisis Regresi

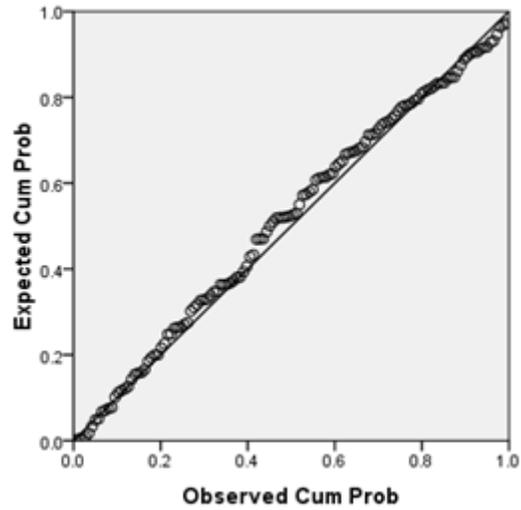
## Rabgkuman Data Khusus

Descriptive Statistics

|                    | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| PE                 | 132 | .02     | .07     | .0488   | .00925         |
| PAD                | 132 | 24.13   | 26.98   | 25.0387 | .43458         |
| DAU                | 132 | 23.92   | 27.50   | 26.6260 | .89760         |
| BM                 | 132 | 23.96   | 26.44   | 25.4414 | .41919         |
| Valid N (listwise) | 132 |         |         |         |                |

## Uji Normalitas





**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                |                | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                              |                | 132                     |
| Normal Parameters <sup>a</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                | Std. Deviation | .38719048               |
| Most Extreme Differences       | Absolute       | .057                    |
|                                | Positive       | .036                    |
|                                | Negative       | -.057                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z           |                | .650                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)         |                | .792                    |

## Uji Multikolonieritas

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

| Model |              |     | DAU   | PE     | PAD   |
|-------|--------------|-----|-------|--------|-------|
| 1     | Correlations | DAU | 1.000 | .035   | -.241 |
|       |              | PE  | .035  | 1.000  | -.376 |
|       |              | PAD | -.241 | -.376  | 1.000 |
|       | Covariances  | DAU | .002  | .005   | .000  |
|       |              | PE  | .005  | 16.006 | -.132 |
|       |              | PAD | .000  | -.132  | .008  |

a. Dependent Variable: BM

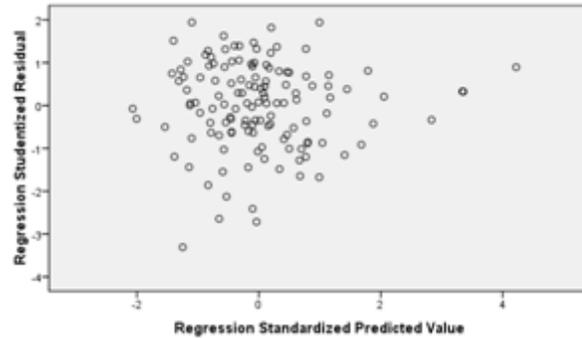
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Collinearity Statistics |           |       |
|--------------|-------------------------|-----------|-------|
|              | B                       | Tolerance | VIF   |
| 1 (Constant) | 15.693                  |           |       |
| PE           | -3.744                  | .855      | 1.169 |
| PAD          | .387                    | .807      | 1.240 |
| DAU          | .009                    | .938      | 1.066 |

a. Dependent Variable:

BM

### Uji heterokedastisitas



### Uji Autokorelasi

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| 1     | .383 <sup>a</sup> | .147     | .127              | 1.886         |

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

### Regresi linier sederhana

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .071 <sup>a</sup> | .005     | -.003             | .41975                     |

a. Predictors: (Constant), PE

b. Dependent Variable: BM

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t       | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |         |      |
| 1     | (Constant) | 25.285                      | .197       |                           | 128.434 | .000 |
|       | PE         | 3.206                       | 3.965      | .071                      | .809    | .420 |

a. Dependent Variable: BM

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .375 <sup>a</sup> | .141     | .134              | .39010                     | 1.177         |

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: BM

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | 16.386                      | 1.964      |                           | 8.343 | .000 |
|       | PAD        | .362                        | .078       | .375                      | 4.612 | .000 |

a. Dependent Variable: BM

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .112 <sup>a</sup> | .013     | .005              | .41814                     | 1.367         |

a. Predictors: (Constant), DAU

b. Dependent Variable: BM

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant) | 24.046                      | 1.084      |                           | 22.176 | .000 |
|       | DAU        | .052                        | .041       | .112                      | 1.288  | .200 |

a. Dependent Variable: BM

## Regresi Linier Berganda

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| 1     | .383 <sup>a</sup> | .147     | .127              | 1.886         |

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

### ANOVA<sup>b</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 3.380          | 3   | 1.127       | 7.344 | .000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 19.639         | 128 | .153        |       |                   |
|       | Total      | 23.019         | 131 |             |       |                   |

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

